

## **BAB 4**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum**

##### **4.1.1 Sejarah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara Rumpin**

Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara*). Dalam rangka mewujudkan tujuan strategis pertahanan negara tersebut, maka faktor utama yang mampu berperan dalam menciptakan perdamaian dunia, membangun industri pertahanan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing adalah faktor Sumber daya manusia, yaitu Warga Negara Indonesia.

Pembangunan karakter bangsa sebagai bagian dari revolusi mental (mewujudkan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi warga negara Indonesia menjadi hal yang perlu dipersiapkan secara dini melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi setiap warga negara Indonesia di lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, dan lingkungan pekerjaan. Pembangunan karakter bangsa dilaksanakan salah satunya dengan pembentukan pusat pendidikan dan pelatihan bela negara untuk membentuk kader bela negara dan membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan pendidikan kewarganegaraan dengan tujuan membina, memperbaiki, dan

atau membentuk aparatur negara dan masyarakat yang memiliki nilai-nilai bela negara.

Revolusi Mental tersebutlah yang mendorong peresmian Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan yang terletak di Kampung Pabuaran, Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang ditandai dengan pengguntingan pita dan Penandatanganan prasasti Pusdiklat Bela Negara oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, pada Selasa, tanggal 28 Februari 2017 di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, Rumpin, Bogor. Hadir pada acara tersebut sejumlah Menteri Kabinet Kerja, beberapa pejabat di lingkungan Kemhan, instansi terkait serta tamu undangan lainnya.

Peresmian tersebut menandai telah tepenuhinya pembangunan berbagai infrastruktur dan sarana prasarana Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan yang akan digunakan untuk menyelenggarakan serangkaian kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka menumbuhkan kesadaran bela negara bagi setiap warga negara Indonesia. Dengan adanya Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan ini maka kedepan diharapkan Pembinaan Kesadaran Bela Negara dapat dikembangkan secara lebih terpadu, sinergis dan komprehensif. Sebagaimana dalam program prioritas “Nawa Cita” menuju Indonesia Hebat, diantaranya Pembinaan Kesadaran Bela Negara menjadi bagian dari revolusi karakter bangsa.

Pembangunan Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan bela negara bagi komponen bangsa merupakan realisasi dari RPJMN 2015-2019 dan sejalan dengan tujuan pertahanan negara yang tertuang dalam Kebijakan Pertahanan Negara yakni terwujudnya Warga Negara Indonesia yang memiliki kesadaran bela negara. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kabadiklat) Kemhan saat itu, Mayjen TNI Hartind Asrin, M.I.Kom memulai titik awal pembentukan Pusdiklat Bela Negara pada tanggal 20 November 2013. Pembangunan ini didasari oleh keyakinan bahwa “Bela Negara” sangat penting untuk mendapatkan atensi

dari semua komponen Bangsa karena merupakan persoalan bangsa. Kemudian Kabag Um Set Badiklat yang menjabat saat itu, Kolonel Inf Sammy Ferrijana S.Sos, M.Si memberikan informasi terkait lahan yang dapat digunakan untuk lokasi pembangunan Pusdiklat, yaitu di Desa Cibodas Kec. Rumpin Kab. Bogor yang merupakan daerah latihan Kemhan.



**Gambar 4.1** Kolonel Inf Sammy Ferrijana S.Sos, M.Si melaksanakan peninjauan awal pada tanggal 13 Desember 2013 ke Desa Cibodas Kec. Rumpin Kab. Bogor

(Sumber: Dokumen Pusdiklat Bela Negara)

Peninjauan lokasi pun dilaksanakan untuk kemudian dilakukan revitalisasi sebagai awal pembangunan Pusdiklat Bela Negara. Usulan susunan Master Plan Pembangunan Pusdiklat Bela Negara diajukan pada tanggal 15 Januari 2014 setelah peninjauan lokasi tersebut dan pada tanggal 12 Maret 2014 dilakukan rapat koordinasi berdasarkan Master Plan tersebut.

Master Plan tersebut akhirnya dapat terealisasi melalui Surat Perintah Menteri Pertahanan nomor: SPRINT/367/IV/2015.



**Gambar 4.2** 15 Januari 2014, susunan Master Plan Pembangunan Pusdiklat Bela Negara diusulkan oleh Kabadiklat Kemhan Mayjen TNI Hartind Asrin, M.I.Kom.

(Sumber: Dokumen Pusdiklat Bela Negara)

#### **4.1.2 Kajian Akademik Pembentukan Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan**

Seiring perjalanan pembangunan Pusdiklat Bela Negara, beberapa kajian akademik dilaksanakan guna mendukung pembangunan tersebut. Pada tanggal 18 Desember 2013, Badiklat Kemhan menyelenggarakan "Seminar dan *Focus Group Discussion* Bela Negara" yang melibatkan Satker di lingkungan Kemhan dan instansi terkait seperti Kemenpora, Lemhanas,

Kemenko Polhukam, Kemendikbud, Kemendagri, Kemenko Kesra dan Kemen PAN dan RB. Kajian akademik dalam bentuk seminar dan FGD tersebut menghasilkan kesimpulan yang disepakati. Kesimpulan tersebut adalah pentingnya memiliki *Leading Sector* dalam pelaksanaan Diklat Bela Negara dalam bentuk sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan, yaitu Pusdiklat Bela Negara yang kemudian diharapkan untuk menjadi "*Centre of Excellence*".

Kajian akademik yang kedua adalah Focus Group Discussion kedua (*Focus Group Discussion-I/FGD-I*) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2015 di Aula Bhineka Tunggal Ika, Gedung Jenderal Sudirman Kemhan Jl. Medan Merdeka Barat 13-14 Jakarta Pusat. Tujuan dari FGD tersebut adalah agar para pemangku kepentingan (*stake holder*) terkait pembentukan Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan dapat memberikan lebih banyak lagi pendapat, saran dan masukan.



**Gambar 4.3** FGD-I dibuka oleh Menhan RI Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu

(Sumber: Dokumen Pusdiklat Bela Negara)

Kajian selanjutnya dilakukan kembali pada tanggal 18 Oktober 2016 oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Mayjen TNI Hartind Asrin,

M.I.Kom. Kajian akademik ini dibuat berdasarkan program prioritas “Nawa Cita” menuju Indonesia Hebat. Prioritas “Nawa Cita” tersebut diantaranya adalah bela negara yang menjadi bagian dari revolusi karakter bangsa. Aspek-aspek seperti pendidikan, sejarah, nilai-nilai patriotisme, cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti untuk ditempatkan secara proporsional di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

#### **4.1.3 Profil dan Struktur Organisasi Pusdiklat Bela Negara**

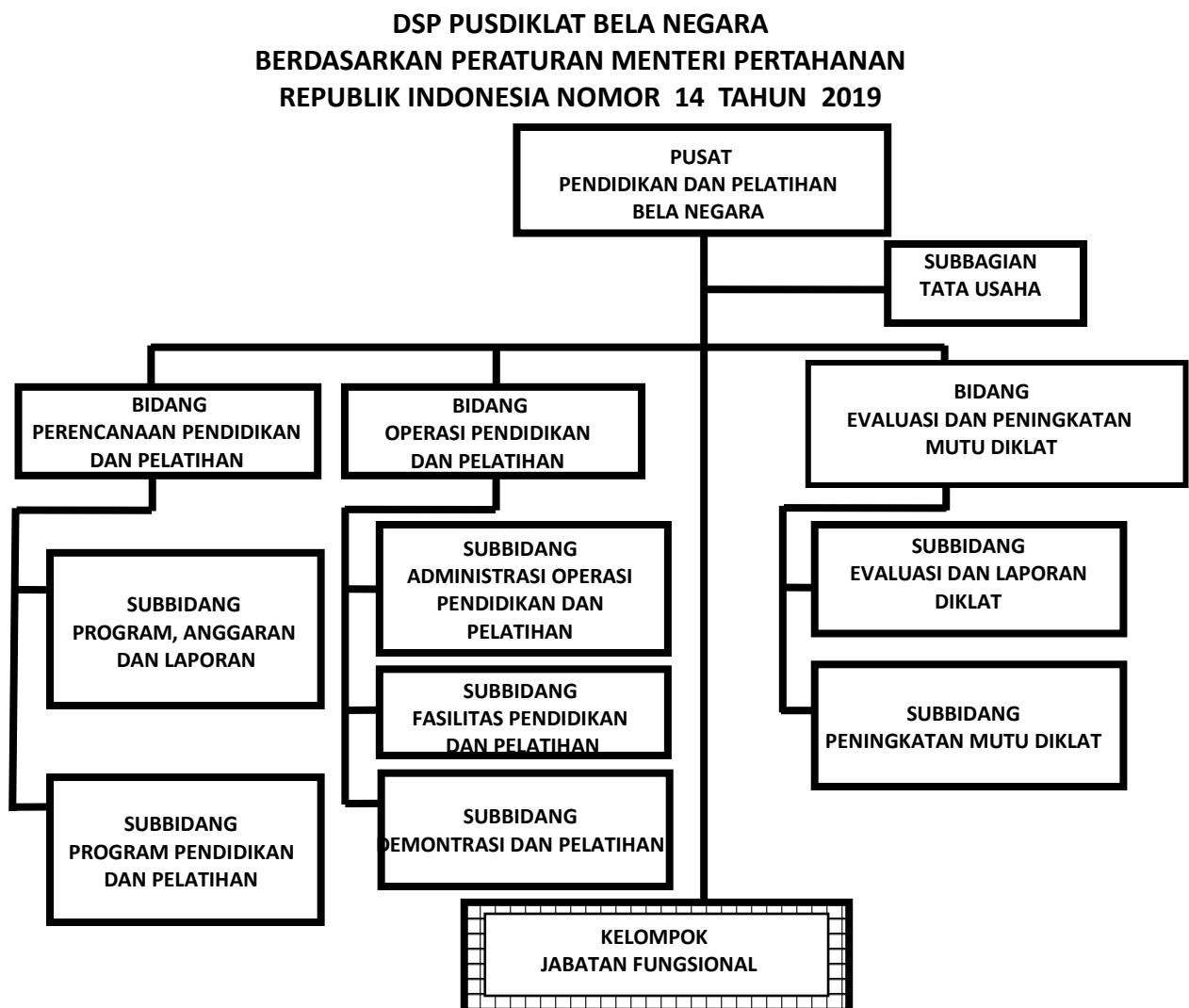
Pusdiklat Bela Negara mulai dibangun pada tahun 2014 diatas lahan seluas 21,33 hektar dan sekarang bertambah luasnya sebesar 23,7 hektar. Didalam Pusdiklat Bela Negara, terdapat berbagai fasilitas dan sarana prasarana yang lengkap, meliputi: kantor, mess bagi peserta calon kader Bela Negara, Kelas Lapangan, Aula Serba Guna, Montenering, Lapangan Sepakbola, Poliklinik, Masjid, Rumah Dinas, Rumah Makan dan Dapur.



**Gambar 4.4** Gedung Mako Pusdiklat Bela Negara Rumpin  
(Sumber : Dokumen Pusdiklat Bela Negara)

Secara struktur organisasi, Pusdiklat Bela Negara sebagai lembaga yang berada dibawah Badiklat Kemhan, saat ini dikepalai oleh Kapusdiklat Bela Negara, Brigjen TNI Kartiko Wardani, M. Tran (Han). Dalam menjalankan operasionalnya tersebut, Pusdiklat Bela Negara memiliki personil-personil yang memiliki kompetensi dibidangnya. Jumlah standar personil Pusdiklat Rumpin tersebut saat ini adalah 133 orang dengan Struktur Organisasi yang dapat ditunjukkan seperti berikut :

**Tabel 4.1** Struktur Organisasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara.  
(Sumber : Biro Ortala Kemhan)



Pusdiklat Bela Negara, sebagai organisasi memiliki Sempana yang berbunyi "*Ingkud Prabeda Ngelar Angsab*" yang artinya Mempersempit Perbedaan dan Memperluas Persamaan. Kata-kata tersebut memiliki arti bahwa Pusdiklat Bela Negara mendidik dan melatih Kader Bela Negara dari berbagai lapisan dan dari berbagai golongan, termasuk didalamnya lingkungan profesi, lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Senantiasa mempersempit perbedaan diantara bangsa Indonesia dari berbagai sumber lapisan dan lingkungan, mempersatukan dengan memperluas persamaan.

Pusat Pendidikan Bela Negara Badiklat Kemhan, berdasarkan Permenhan RI no 14, Tahun 2019, bertugas sebagai unsur pelaksana tugas dan fungsi dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan (Badiklat) yang dipimpin oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara yang disebut Kapusdiklat Bela Negara. Pusat Pendidikan Bela Negara untuk itu bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan dan meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan di bidang pembentukan kader bela negara. Adapun fungsi-fungsi dari Pusdiklat Bela Negara adalah:

- a. Mempersiapkan dan menyusun kebijakan teknis serta menyusun rencana program pendidikan dan pelatihan pembentukan kader bela negara.
- b. Melakukan penyusunan serta mengembangkan kurikulum pendidikan dan pelatihan Kader Bela Negara
- c. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan bela negara secara menyeluruh yang dimulai dari proses administrasi, operasional, mempersiapkan infrastruktur, mempersiapkan dokumen kelulusan pendidikan dan pelatihan bela negara, serta membina tenaga pendidik serta pelatih dalam proses pembentukan kader bela negara.

- d. Melakukan pemantauan, evaluasi serta melaporkan kegiatan pendidikan serta pelatihan agar dapat kemudian meningkatkan mutu proses pendidikan dan pelatihan kader bela negara.
- e. Melakukan pendataan serta penataan para tenaga pendidik serta pelatih para peserta diklat.
- f. Membina para pemegang jabatan fungsional di lingkungan pemerintah pusat.
- g. Melaksanakan administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan pusat, ketatausahaan serta keuangan.

#### **4.1.7 Biro Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Pertahanan**

Kementerian Pertahanan atau selanjutnya disebut sebagai Kemhan. Pada awal kemerdekaan Indonesia, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, fungsi kementerian pertahanan dipegang oleh Kementerian Keamanan Rakyat. Hingga pada akhirnya pada Jenderal Sri Sultan Hamengkubuwono IX menduduki jabatan sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan pada tanggal 15 Juli 1949, setelah Indonesia menghadapi tekanan dari tentara Belanda pada era Kabinet Hatta ke-1 periode 29 Januari 1948-1949. Dimana sebelumnya dipegang secara ad interim oleh Drs. Moh Hatta.

Sebuah transformasi kemudian terjadi pada era Presiden Abdurrahman Wahid dimana TNI menjadi lembaga otonom setelah Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi dilepas dari Departemen Pertahanan dan Keamanan. Proses ini menjadikan TNI bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan menempatkan Prof. Dr. Juwono Sudarsono pada periode 1999-2000 sebagai Menteri Pertahanan. Posisi TNI yang strategis dan berperan penting dalam menjaga Keamanan Negara serta Keselamatan Bangsa, akhirnya membawa TNI pada transformasi kedua yang terjadi pada era Kabinet Bersatu Ke-II yang dipimpin oleh Presiden saat itu, Jenderal TNI (Purn) Susilo Bambang

Yudhoyono. Pada masa ini nama Departemen Pertahanan RI berubah menjadi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Perubahan yang terjadi ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan dilaksanakan oleh Menteri Pertahanan saat itu, Prof. Dr. Ir. Purnomo Yusgiantoro dengan Letnan Jenderal TNI Sjafrie Sjamsoeddin, MA, Msc sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Saat ini, pada Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 yang dipimpin oleh pemerintahan Presiden Ir. Joko Widodo. Posis Menteri Pertahanan ditempati oleh Letnan Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto.

Secara strategis, tugas dari Kemhan sebagai unsur pelaksana yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang bertanggungjawab langsung terhadap Presiden adalah untuk menyelenggarakan urusan pertahanan dalam membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Secara fungsi, Kemhan menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu;

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pertahanan, perencanaan pertahanan, potensi pertahanan, dan kekuatan pertahanan,
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan,
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan,
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan,
- e. Pelaksanaan pengelolaan sarana pertahanan,
- f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertahanan,
- g. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan,
- h. Pelaksanaan pengelolaan instalasi strategis pertahanan,
- i. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah,

- j. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Tugas dan Fungsi Kementerian tersebut diatas adalah sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian Pertahanan yang tertuang pada Peraturan Presiden Indonesia Nomo 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan, Pasal 2 untuk tugas dan Pasal 3 untuk fungsi Kemhan. Fungsi dan tugas ini kemudian disebutkan kembali dalam Peraturan Menteri Pertahana Republik Indonesia Nomo 14 Tahun 2019.

Dalam Lembaga Kementerian Pertahanan, terdapat sebuah unsur pelaksana yang bertugas untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang bersifat teknis. Kebijakan tersebut bersifat membina serta menata organisasi, melakukan tata laksana dan mereformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kemenhan dengan program-program nya. Unsur pelaksana ini disebut sebagai Biro Organisasi dan Tata Laksana atau selanjutnya disebut Ro Ortala. Dalam melaksanakan tugasnya, Ro Ortala memiliki beberapa fungsi yang disebutkan dalam Permenhan Nomor 14 Tahun 2019, yaitu;

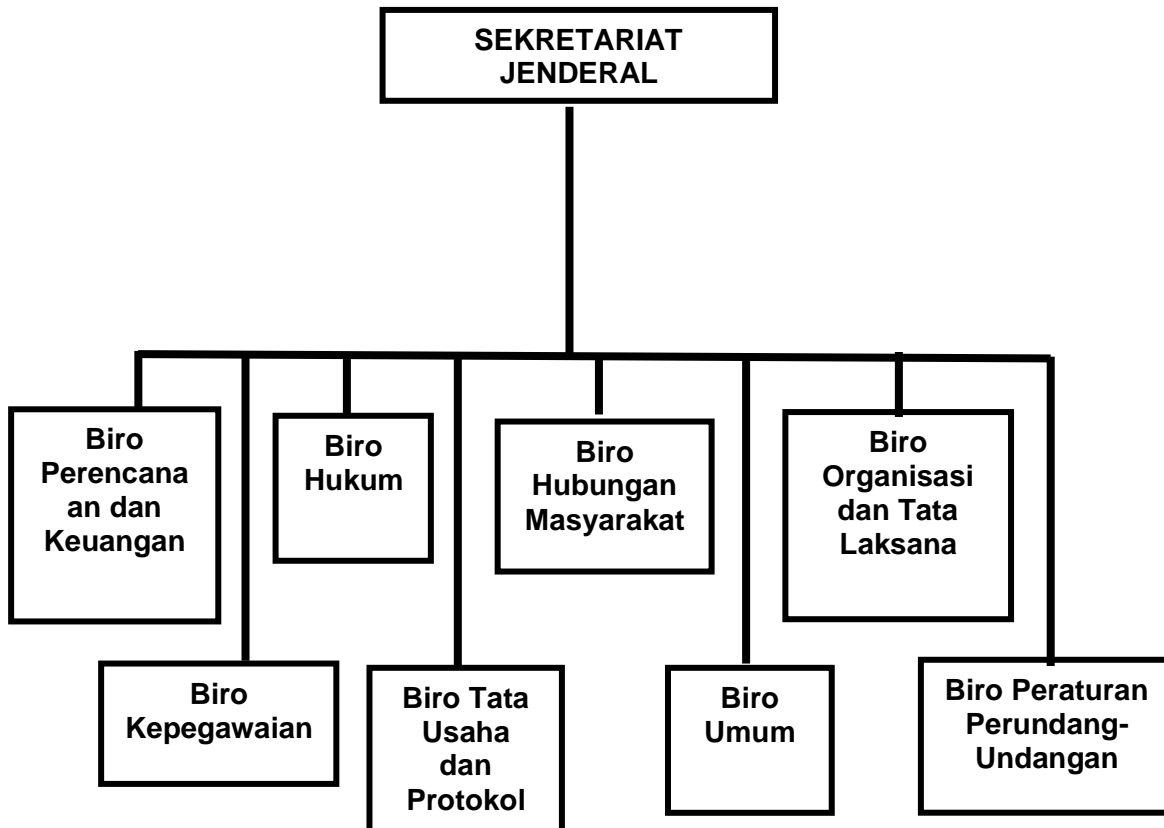
1. perumusan kebijakan teknis di bidang organisasi dan tata laksana Kemhan,
2. pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana di lingkungan Kemhan,
3. pelaksanaan standardisasi jabatan di lingkungan Kemhan,
4. pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan, pengembangan program dan evaluasi reformasi Birokrasi di lingkungan Kemhan,
5. perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kemhan,
6. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro.

Saat ini Biro Ortala Kemhan di pimpin oleh Kepala Biro dan Organisasi Tata Laksana yang disebut Karo Ortala. Dalam menjalankan fungsinya Ro Ortala

berada di bawah Sekretariat Jenderal Pertahanan dengan struktur seperti dibawah :

**Tabel 4.2** Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Pertahanan

(Sumber: Biro Ortala Kemhan)



## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Peran Pusdiklat Bela Negara dalam Usaha Pertahanan Negara**

Dalam membangun keamanan nasional, maka dibutuhkan kerja sama yang efektif dari tiga pilar negara, yaitu pemerintah, rakyat dan militer. Dalam menghadapi potensi-potensi ancaman, maka negara harus memperkuat diri dengan cara mengelola berbagai sumber daya nasionalnya dengan baik. Untuk itu Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan yang berada di bawah Kementerian Pertahanan menyusun Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional yang kini sudah disahkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 26 September 2019 dalam Rapat Paripurna DPR RI. Pengesahan Undang-Undang ini menandakan betapa pentingnya usaha dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara ini. Dalam Undang-Undang tersebut, hal yang ditempatkan pertama adalah “Bela Negara”. Tentu saja karena setiap warga negara Indonesia adalah faktor utama dalam usaha pertahanan negara, atau dalam UU PSDN disebut sebagai Sumber Daya Manusia. Hal ini menunjukkan pentingnya pembinaan terhadap setiap warga negara Indonesia dalam membangun karakter Bela Negara demi menjaga pertahanan dan keamanan negara.

Pentingnya pendidikan dan pelatihan Bela Negara sebagai alat pertahanan negara juga diungkapkan oleh Kabid Evkat Mutu Diklat, Kolonel Inf. Ade Kurnianto dalam sebuah wawancara.

Pada zamannya Bapak Ryamizard itu ada namanya Proxy War, jadi kita diadu domba, kita narkoba, terorisme, radikalisme. Nah salah satu untuk mencegah itu semua dengan adanya pendidikan dan pelatihan Bela Negara.

Pendidikan Bela Negara juga penting dalam kehidupan berwarga negara untuk memelihara kebangsaan dan persatuan rakyat Indonesia, dalam salah

satu wawancara dengan Personil Pelatih di Pusdiklat Belneg, yaitu Kapten Inf. Dr. Teguh Anggoro, S.I.P., M.Sc.

Bela Negara itu sangat penting, karena kondisi dan situasi sekarang ini, salah satunya artinya memberikan wawasan. Berbeda seperti waktu kita kecil sudah diajarkan sejarah perjuangan bangsa, cinta tanah air, Pancasila. Pemerintah berperan agar kita tidak keluar jalur. Generasi sekarang supaya betul-betul cinta tanah air.

Maka dari itu, pengelolaan Sumber Daya Manusia dengan pendidikan dan pelatihan Bela Negara yang tepat akan meningkatkan daya tangkal terhadap ancaman kepada kedaulatan Negara Republik Indonesia.

#### **4.2.1.1 Program Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara**

Fungsi dari Pusdiklat Bela Negara merupakan sebagai unsur pelaksana dari Badiklat Kemhan adalah untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan Bela Negara baik itu secara terpusat ataupun dilakukan secara luas. Maka kegiatan inti dari Pusdiklat Bela Negara adalah Operasional Pendidikan dan Pelatihan (Opsdiklat) sedangkan Evaluasi Peningkatan Mutu (Evkat Mutu) adalah bagian pendukung yang meningkatkan mutu dari Opsdiklat tersebut. Sebagai salah satu alat pertahanan Negara, keberadaan Pusdiklat Bela Negara menjadi sangat penting. seperti yang diutarakan oleh Kabid Evkat Mutu Dilklat Bela Negara Pusdiklat.

Peran Pusdiklat Bela Negara penting karena Pusdik bela negara satu-satunya yang melatih dan mendidik mind-set para pemuda pemudi di Ingja, lingmas dan lindik. Tentunya ini sangat dibutuhkan jika situasi negara pada keadaan genting, memang ini kan jangka panjang, Karena bela negara ini kan nanti kita siap pada saat dibutuhkan, karena memang kan kegiatan bela negara ini amanat Undang-Undang, setiap warga negara wajib. Ya wadahnya disini di Pusdiklat Bela Negara. Meskipun ada juga di Kodam-kodam, tapi tidak seperti yang kita lakukan di pusdiklat bela negara ini. Disini khusus untuk merubah mindset, bagaimana masyarakat bisa mencintai, kemudian rasa patriotisme nya dan nasionalisme nya terhadap negara.

Hal ini didukung oleh program pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh Bidang Opsdiklat Pusdiklat Bela Negara berupa 60% praktek lapangan dan 40% materi kelas. Komposisi tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan agar para kader banyak melaksanakan kegiatan yang nyata dalam menanamkan teori, disiplin serta karakter-karakter lain dari Bela Negara. Dari informasi yang didapatkan dari bidang Opsdiklat, bahwa materi pelajaran yang dituangkan dalam komposisi tersebut, didalamnya memuat konten-konten Bela Negara yang meliputi materi;

- Wawasan Kebangsaan (4 Konsensus Dasar Negara)
  - Pengantar Bela Negara
- Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta)/Balingstra
- Kepemimpinan wawasan Bela Negara
- Nilai Dasar Bela Negara
  - Cinta tanah air
  - Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
  - Setia Pada Pancasila Sebagai Ideologi Negara
  - Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara
  - Kemampuan awal Bela Negara (fisik dan non fisik)
- Keterampilan Dasar Bela Negara
  - Pengenalan PUD
  - Kewaspadaan dini
  - Baris Berbaris
  - Penghormatan
  - Tata Upacara
  - Bela Diri
  - Caraka Malam dan Api Semangat Bela Negara
- Muatan Lokal Instansi, Bimbingan dan Pengasuhan, Upacara Pembukaan/Penutupan

- Sejarah Perjuangan
- Terorisme: Radikalisme dan Penanggulangan
- Narkoba dan Penanggulangan

Sedangkan untuk materi pelatihan para calon Kader Bela Negara, adalah diantaranya sebagai berikut;

1. Peraturan Baris Berbaris
2. Etika Kadet
3. Bongkar Tenda
4. Peta Kompas
5. Outbond
6. Senam Maumere
7. Caraka Malam
8. Menembak
9. Bela Diri

Kesemua materi pembelajaran tersebut dirangkai dalam sebuah kurikulum komprehensif dengan berbagai metode seperti; Ceramah (materi kelas), tanya jawab, permainan, simulasi, praktek, ikrar, internalisasi nilai-nilai, bimbingan, konseling serta pemberian tugas dan sangsi. Rangkaian dari keseluruhan materi dan metode-metode tersebut sebagai sebuah kurikulum, dapat dilihat pada tabel Agenda Pembelajaran Diklat (2019) berikut ini.

**Tabel 4.3** Agenda Pembelajaran Pusdiklat Bela Negara

Sumber : Bidang Rendiklat Pusdiklat Bela Negara, 2020

No	Materi Pelajaran	Jumlah JP				Tujuan		Pokok Bahasan	Jumlah JP			Metode	Pokok Materi Evaluasi
		MP	MP			Kurikuler	Instruksi Umum		MP				
			T	P	U				T	P	U		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>A</b>	<b>Bidang Studi Dasar</b>	<b>14</b>											
1	Pengantar Bela Negara	(2)	2	-	-	Setelah mengikuti pembelajaran peserta memahami tentang Bela Negara	Agar peserta memahami tentang Bela Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendahuluan</li> <li>b. Sejarah Bela Negara</li> <li>c. Dasar Hukum Bela Negara</li> <li>d. Agenda prioritas pemerintah 2014-2019 tentang Revolusi Karakter Bangsa</li> <li>e. Kebijakan umum Pertahanan Negara 2015-2019</li> <li>f. Kebijakan penyelenggaraan Pertahanan Negara 2015-2019</li> <li>g. Penutup</li> </ul>	2	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ceramah</li> <li>- Tanya jawa b</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sejarah Bela Negara</li> <li>- Dasar Hukum Bela Negara</li> <li>- Agenda prioritas pemerintah 2014-2019 tentang Revolusi Karakter Bangsa</li> <li>- Kebijakan umum Pertahanan Negara 2015-2019</li> <li>- Kebijakan penyelenggaraan Pertahanan Negara 2015-2019</li> </ul>

2	Pengetahuan tentang Wawasan Kebangsaan (Empat Konsensus Dasar Bangsa)	(2)	2	-	-	Setelah mengikuti pembelajaran peserta mengerti tentang wawasan kebangsaan (empat konsensus dasar bangsa)	Agar peserta mengerti tentang wawasan kebangsaan (empat konsensus dasar bangsa)	a. Pendahuluan Nilai-nilai Pancasila c. UUD RI 1945 d. Bhineka Tunggal Ika e. Nilai-nilai NKRI Penutup	2	-	-	- Ceramah Tanya jawab	- Nilai-nilai Pancasila - UUD RI 1945 - Bhineka Tunggal Ika - Nilai-nilai NKRI
3	Pengetahuan tentang Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta)	(2)	2	-	-	Setelah mengikuti pembelajaran peserta mengerti Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta)	Agar peserta mengerti tentang Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta)	a. Pendahuluan b. Pengertian dan Hakekat Sishanta c. Komponen Sishanta d. Pola-pola Operasi dalam Sishanta Penutup	2	-	-	- Ceramah - Tanya jawab	- Pengertian dan Hakekat Sishanta - Komponen Sishanta - Pola-pola Operasi dalam Sishanta
4	Pengetahuan tentang Sejarah Perjuangan Bangsa	(2)	2	-	-	Setelah mengikuti pembelajaran peserta mengerti tentang sejarah perjuangan Bangsa	Agar peserta mengerti tentang sejarah perjuangan bangsa	a. Pendahuluan b. Sejarah Perjuangan Sebelum, Masa, Pasca c. Kemerdekaan Tokoh-tokoh Pejuang Kemerdekaan d. Penutup	2	-	-	- Ceramah - Tanya jawab	- Sejarah Perjuangan Sebelum, Masa, Pasca Kemerdekaan - Tokoh-tokoh Pejuang Kemerdekaan

5	Pengetahuan tentang Kepemimpinan berwawasan Bela Negara	(2)	2	-	-	Setelah mengikuti pembelajaran peserta mengerti Kepemimpinan berwawasan Bela Negara	Agar peserta memahami tentang Kepemimpinan berwawasan Bela Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendahuluan</li> <li>b. Pemimpin/Ke pemimpin</li> <li>c. Tugas, Fungsi, Peran Kepemimpinan</li> <li>d. Gaya dan Perilaku Kepemimpinan</li> <li>e. Kepemimpinan dalam Manajemen</li> <li>f. Hubungan Kepemimpinan dengan kekuasaan</li> <li>g. Penutup</li> </ul>	2	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ceramah</li> <li>- Tanya jawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemimpin/ Kepemimpinan</li> <li>- Tugas, Fungsi, Peran Kepemimpinan</li> <li>- Gaya dan Prilaku Kepemimpinan</li> <li>- Kepemimpinan dalam Manajemen</li> <li>- Hubungan Kepemimpinan dengan kekuasaan</li> </ul>
6	Pengetahuan tentang Bahaya Narkoba dan Penanggulangannya	(2)	1	1	-	Setelah mengikuti pembelajaran peserta diklat mengerti pengetahuan tentang pencegahan dan penanggulangan narkoba	Agar peserta diklat memahami pengetahuan tentang pencegahan dan penanggulangan narkoba	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendahuluan</li> <li>b. Pengertian Narkoba</li> <li>c. Macam- macam Narkoba/ NAPZA (Narkotik, Alkohol, Psicotropika, Zat Adiktif)</li> <li>d. Faktor yang mendorong penggunaan Narkoba</li> <li>e. Pencegahan dan penanggulangan bahaya Narkoba</li> <li>f. Studi kasus</li> <li>g. Penutup</li> </ul>	1	1	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ceramah</li> <li>- Tanya jawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian Narkoba</li> <li>- Macam-macam Narkoba/ NAPZA (Narkotik, Alkohol, Psicotropikaa, Zat Adiktif)</li> <li>- Faktor yang mendorong penggunaan Narkoba</li> <li>- Pencegahan dan penanggulangan bahaya Narkoba</li> <li>- Studi kasus</li> </ul>

7	Pengetahuan tentang Terorisme dan Radikalisme serta Penanggulangannya	(2)	1	1	-	Setelah mengikuti pembelajaran peserta mengerti dan dapat membuat rencana persiapan pembelajaran tentang Bahaya Terorisme dan Radikalisme serta Penanggulangannya	Agar peserta mengerti dan dapat membuat rencana persiapan pembelajaran tentang Bahaya Terorisme dan Radikalisme serta Penanggulangannya	a. Pendahuluan Pengertian Terorisme dan Radikalisme c. Tipologi ancaman dan motif terorisme dan radikalisme d. Faktor penyebab terjadinya terorisme dan radikalisme e. Filosofi Pemberantasan Tindak Pidana terorisme dan radikalisme f. Peran masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme dan radikalisme g. Penutup	1	1	-	- Ceramah - Tanya jawab	- Pengertian Terorisme dan Radikalisme - Tipologi ancaman dan motif terorisme dan radikalisme - Faktor penyebab terjadinya terorisme dan radikalisme - Filosofi Pemberantasan Tindak Pidana terorisme dan radikalisme - Peran masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme dan radikalisme.
<b>B</b>	<b>Bidang Studi Inti</b>	<b>22</b>											
1	SBS. Nilai-nilai Dasar Bela Negara	(3)	2	1	-				2	1	-		

a	Cinta Tanah Air				Setelah mengikuti pembelajaran peserta mengerti Cinta Tanah Air	Agar peserta mengerti tentang Cinta Tanah Air	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendahuluan</li> <li>2) Nilai cinta tanah air (indikator cinta tanah air)</li> <li>3) Implementasi cinta tanah air</li> <li>4) Penutup</li> </ol>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ceramah</li> <li>- Tanya jawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai cinta tanah air (indikator cinta tanah air)</li> <li>- Implementasi cinta tanah air</li> </ul>
b	Kesadaran Berbangsa dan Bernegara				Setelah mengikuti pembelajaran peserta mengerti tentang kesadaran berbangsa dan bernegara	Agar peserta mengerti tentang kesadaran berbangsa dan bernegara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendahuluan</li> <li>2) Nilai kesadaran berbangsa dan bernegara (indikator kesadaran berbangsa dan bernegara)</li> <li>3) Implementasi kesadaran berbangsa dan bernegara</li> <li>4) Penutup</li> </ol>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ceramah</li> <li>- Tanya jawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai kesadaran berbangsa dan bernegara (indikator kesadaran berbangsa dan bernegara)</li> <li>- Implementasi kesadaran berbangsa dan bernegara.</li> </ul>
c	Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara				Setelah mengikuti pembelajaran peserta mengerti tentang keyakinan	Agar peserta mengerti tentang keyakinan pada Pancasila	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendahuluan</li> <li>2) Nilai setia pada Pancasila sebagai ideologi negara</li> <li>3) Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari</li> <li>4) Senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila</li> </ol>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ceramah</li> <li>- Tanya jawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai setia pada Pancasila sebagai ideologi negara</li> <li>- Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari</li> <li>- Senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila</li> </ul>

						5) Setia pada Pancasila dan meyakini Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia 6) Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara Indonesia 7) Penutup					- Setia pada Pancasila dan meyakini Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia - Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara Indonesia	
d	Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara				Setelah mengikuti pembelajaran peserta mengerti tentang rela Berkorban untuk bangsa dan negara	Agar peserta mengerti tentang rela berkorban untuk bangsa dan negara	1) Pendahuluan 2) Rela berkorban untuk bangsa dan negara 3) Implementasi rela berkorban untuk bangsa dan negara 4) Penutup				- Ceramah - Tanya jawab	- Rela berkorban untuk bangsa dan negara - Implementasi rela berkorban untuk bangsa dan negara
e	Kemampuan Awal Bela Negara				Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diklat mengerti tentang pentingnya bagaimana memiliki	Agar peserta diklat mengerti tentang pentingnya bagaimana memiliki kemampuan awal	1) Pendahuluan 2) Pengertian dan manfaat memiliki kemampuan awal bela negara 3) Membina kemampuan fisik yang prima 4) Membina kesehatan psikis				- Ceramah - Tanya jawab	- Pengertian dan manfaat memiliki kemampuan awal bela negara - Membina kemampuan fisik yang prima - Membina kesehatan fisik yang baik - Membina kecerdasan

						kemampuan awal bela negara	bela negara	yang baik 5) Membina kecerdasan spiritual (SQ) 6) Membina kesadaran emosional (EQ) 7) Membina kesadaran intelektual (IQ) 8) Membina kesadaran adverse (AQ) 9) Penutup					spiritual (SQ) - Membina kesadaran emosional (EQ) - Membina kesadaran intelektual (IQ) - Membina kesadaran adverse (AQ)
2	SBS. Keterampilan Dasar Bela Negara												
a	Keterampilan Bela Negara/ <i>Outbound</i>	(5)	-	5	-	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta Diklat dapat mengaplikasikan seluruh pelajaran yang telah diberikan ke dalam bentuk nyata dalam lingkungan	Agar peserta Diklat mampu mengaplikasikan seluruh pelajaran yang telah diberikan kedalam bentuk nyata dalam lingkungan	1) Pendahuluan 2) Pokok-pokok penyelenggaraan keterampilan bela negara 3) Pelaksanaan keterampilan bela negara 4) Penutup	-	5	-	- Ceramah - Tanya jawab - Games - Simulasi	- Pokok-pokok penyelenggaraan keterampilan bela negara - Pelaksanaan keterampilan bela negara

b	Kewaspadaan Dini	(2)	1	1	-	Setelah mengikuti pembelajaran peserta mengerti tentang Kewaspadaan Dini	Agar peserta mengerti tentang Kewaspadaan Dini	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendahuluan</li> <li>2) Pengertian kewaspadaan dini</li> <li>3) Deteksi dan peringatan dini dalam sistem keamanan Nasional</li> <li>4) Kewaspadaan dini di daerah</li> <li>5) Pengembangan kemampuan kewaspadaan dini</li> <li>6) Implementasi kewaspadaan dini</li> <li>7) Penutup</li> </ol>	1	1	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ceramah</li> <li>- Tanya jawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian kewaspadaan dini</li> <li>- Deteksi dan peringatan dini dalam sistem keamanan Nasional</li> <li>- Kewaspadaan dini di daerah</li> <li>- Pengembangan kemampuan kewaspadaan dini</li> <li>- Implementasi kewaspadaan dini</li> </ul>
c	UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	(2)	1	1	-	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diklat mengerti tentang UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Agar peserta mampu melaksanakan lalu lintas yang baik dan benar dan tidak menyalahi aturan lalu lintas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendahuluan</li> <li>2) Pengertian LLAJ</li> <li>3) Fungsi Rambu Lalu Lintas</li> <li>4) Gerakan Lalu Lintas</li> <li>5) Hak utama kendaraan tertentu</li> <li>6) Hak Pejalan Kaki</li> <li>7) Penutup</li> </ol>	1	1	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ceramah</li> <li>- Tanya jawab</li> <li>- Simulasi</li> <li>- Praktek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengertian LLAJ</li> <li>- Fungsi Rambu Lalu Lintas</li> <li>- Gerakan Lalu Lintas</li> <li>- Hak utama kendaraan tertentu</li> <li>- Hak Pejalan Kaki</li> </ul>

d	Peraturan Baris Berbaris	(2)	-	2	-	Setelah mengikuti pembelajaran peserta dapat melaksanakan aturan baris berbaris dan penghormatan dengan benar	Agar peserta dapat melaksanakan aturan baris berbaris dan penghormatan dengan benar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendahuluan</li> <li>2) Ketentuan umum Peraturan Baris Berbaris</li> <li>3) Cara menyampaikan laporan</li> <li>4) Gerakan ditempat perorangan, kelompok, satuan</li> <li>5) Gerakan berjalan perorangan, kelompok, satuan</li> <li>6) Penghormatan ditempat, berjalan, berkendaraan</li> <li>7) Penghormatan di dalam dan di luar ruangan</li> <li>8) Penutup</li> </ol>	-	2	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ceramah</li> <li>- Tanya jawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketentuan umum Peraturan Baris Berbaris</li> <li>- Cara menyampaikan laporan</li> <li>- Gerakan ditempat perorangan, kelompok, satuan</li> <li>- Gerakan berjalan perorangan, kelompok, satuan</li> <li>- Penghormatan ditempat, berjalan, berkendaraan</li> <li>- Penghormatan di dalam dan di luar ruangan</li> </ul>
e	Keprotokolan	(2)	-	2	-	Setelah mengikuti pembelajaran peserta dapat melaksanakan aturan keprotokolan dengan benar	Agar peserta dapat melaksanakan aturan keprotokolan dengan benar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pendahuluan</li> <li>2) Acara kenegaraan</li> <li>3) Acara resmi</li> <li>4) Tata tempat</li> <li>5) Tata upacara</li> <li>6) Tata penghormatan</li> <li>7) Penutup</li> </ol>	-	2	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ceramah</li> <li>- Tanya jawab</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acara kenegaraan</li> <li>- Acara resmi</li> <li>- Tata tempat</li> <li>- Tata upacara</li> <li>- Tata penghormatan</li> </ul>

f	Bela Diri	(2)	-	2	-	Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta Diklat dapat menerapkan tata cara bela diri	Agar peserta Diklat dapat mengikuti pembelajaran ini peserta Diklat dapat menerapkan tata cara bela diri	1) Pendahuluan 2) Pengertian dan manfaat bela diri 3) Sikap gerak dasar 4) Kuda-kuda 5) Perubahan arah 6) Sikap tempur 7) Pukulan 8) Tangkisan 9) Tendangan 10) Penutup	-	2	-	- Ceramah - Tanya jawab - Praktek	- Pengertian dan manfaat bela diri - Sikap gerak dasar - Kuda-kuda - Perubahan arah - Sikap tempur - Pukulan - Tangkisan - Tendangan
g	Caraka Malam	(2)	-	2	-	Setelah mengikuti pembelajaran peserta mampu mengerjakan secara terbatas dalam menyampaikan informasi dalam keadaan darurat, serta dapat menghayati makna dari seluruh proses pembelajaran	Agar peserta mampu mengerjakan secara terbatas dalam menyampaikan informasi dalam keadaan darurat, serta dapat menghayati makna dari seluruh proses pembelajaran	1) Pendahuluan 2) Konsep caraka malam 3) Perencanaan caraka malam 4) Pelaksanaan caraka malam 5) Evaluasi dan pelaporan caraka malam 6) Penutup	-	2	-	- Praktek di lapangan	- Konsep caraka malam - Perencanaan caraka malam - Pelaksanaan caraka malam - Evaluasi dan pelaporan caraka malam

						bela negara	negara						
h	Api Semangat Bela Negara	(2)	-	2	-	Setelah mengikuti pembelajaran bela negara, peserta menyelenggarakan kegiatan Api semangat bela negara	Agar peserta menyelenggarakan kegiatan Api semangat bela negara dengan benar	1) Pendahuluan 2) Konsep acara ASBN 3) Perencanaan acara ASBN Pelaksanaan acara ASBN 5) Evaluasi dan laporan acara ASBN 4) Penutup	-	2	-	- Internalisasi nilai-nilai Bela Negara - Ikrar - Bela Negara	- Konsep acara ASBN - Perencanaan acara ASBN - Pelaksanaan acara ASBN - Evaluasi dan laporan - acara ASBN
<b>C</b>	<b>Bidang Studi Pendukung</b>	<b>4</b>											
1	Bimbingan dan Pengasuhan	(2)	-	2	-	Peserta mengerti tentang bimbingan dan pengasuhan selama mengikuti Diklat	Agar peserta mengerti tentang bimbingan dan pengasuhan selama mengikuti Diklat	a. Pendahuluan b. Penjelasan Juknis tentang Bimsuh c. Pelaksanaan Bimsuh d. Pengawasan dan Pengendalian e. Penutup	-	2	-	- Ceramah - Tanya Jawab - Keteladanan - Bimbingan - Konseling - Pemberian tugas-	- Penjelasan Juknis tentang Bimsuh - Pelaksanaan Bimsuh - Pengawasan dan Pengendalian

											tugas - Pemberian sangsang		
2	Upacara Pembukaan/ Penutupan	(2)	-	2	-	Peserta memiliki kesiapan dalam mengikuti Diklat	Agar peserta memiliki kesiapan dalam mengikuti Diklat	a. Persiapan b. Tata Upacara buka/tutup c. Pelaksana	-	2	-	- Praktek	- Pokok bahasan yang relevan dengan tujuan dan sasaran Diklat
	<b>Jumlah</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>16</b>	<b>24</b>								

Dalam wawancara yang sama, Kabid Evkat Mutu Diklat Bela Negara juga menyampaikan bahwa Pusdiklat memiliki keberadaan yang strategis dalam mendukung kebijakan negara dalam pertahanan jangka panjang. Pendidikan dan pelatihan Bela Negara merupakan sebuah investasi jangka panjang, namun dampak kedepan sangat signifikan dalam berperan serta menjaga pertahanan negara seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang PSDN.

Dengan adanya pusdik itu kita untuk menjaga itu, perubahan itu pasti ada, tetapi ini kan jangka panjang tapi pasti sehingga kedepan dalam kondisi perang atau genting, masyarakat sudah siap, karena udsah punya dasar bagaimana mereka bersikap bertindak atau melakukan hal hal yang membawa nama bangsa ini

Dalam percakapan yang sama, juga disampaikan bahwa keberadaan Pusdiklat didasari dengan semakin beragam nya ancaman terhadap negara Indonesia, baik dari dalam maupun dari luar. Dari segi Pertahanan, keberadaan Bela Negara yang diadakan oleh negara Indonesia dapat memberikan efek gentar terhadap negara-negara lain.

Ini kan program nya jaman menteri pertahanan Bapak Ryamizard. Dengan memberikan statement mencetak 100 ribu kader bela negara itu, tetangga-tetangg kita sudah gentar. Tujuan kita dalam memberikan shock terapi kepada negara-negara tetangga bahwa kita siap dalam menghadapi ancaman apapun, kan ini sebenarnya dalam rangka pertahanan negara, dan fungsi kita pertahanan negara, ya bagaimana kita membangun kekuatan kedalam. maka upaya-upaya yang kita lakukan ini keliatan sekali. Kader-kader bela negara daerah sudah memahami arti bela negara itu sendiri walau tidak semuanya bisa kita didik dan latih.

Maka dari itulah pendidikan dan pelatihan dilaksanakan dalam setiap lapisan pendidikan, pekerjaan serta pemukiman. Agar pertahanan negara dapat bersifat menyeluruh dan masyarakat dapat saling menguatkan jika terdapat ancaman. Lapisan pendidikan, pekerjaan serta pemukiman tersebut merupakan lingkungan strategis Pusdiklat yang secara detail menyasar pada:

- a. Lingkungan Pekerjaan;
  - Lembaga Negara
  - Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dan Pemda
  - TNI
  - Polri
  - BUMN/BUMD
  - Badan Usaha Swasta
  - Badan lain sesuai dengan peraturan Per UU
- b. Lingkungan Pendidikan;
  - Jalur Pendidikan
  - Jenjang Pendidikan
  - Jenis Pendidikan
- c. Lingkungan Masyarakat/Pemukiman;
  - Tokoh Agama
  - Tokoh Masyarakat
  - Tokoh Adat
  - Kader Ormas
  - Kader Organisasi Profesi
  - Kader Parpol
  - Pok Masyarakat Lainnya

Untuk dapat menyerap sasaran-sasaran kaderisasi bela negara tersebut, dibentuklah Pendidikan Program dan Pendidikan Non Program. Pendidikan Program merupakan Pendidikan Bela Negara yang sudah diprogram selama setahun kedepan melalui agenda Kementerian Pertahanan melalui Badiklat Kemhan. Para peserta pelatihan Program adalah dari lingkungan pekerjaan Kementerian Pertahanan dan Kementerian lainnya sesuai dengan rancangan dan anggaran yang dibuat dengan pengawasan

serta persetujuan Badiklat Kemhan. Sedangkan Pendidikan Non Program merupakan sebuah pendidikan dan pelatihan yang merupakan kerjasama antara Pusdiklat Bela Negara dengan Instansi lain seperti BUMN/BUMD dan Badan Usaha Swasta. Pada Pendidikan Non-Program, para peserta pendidikan dan pelatihan berada di luar jadwal dan anggaran yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan setahun sebelumnya.

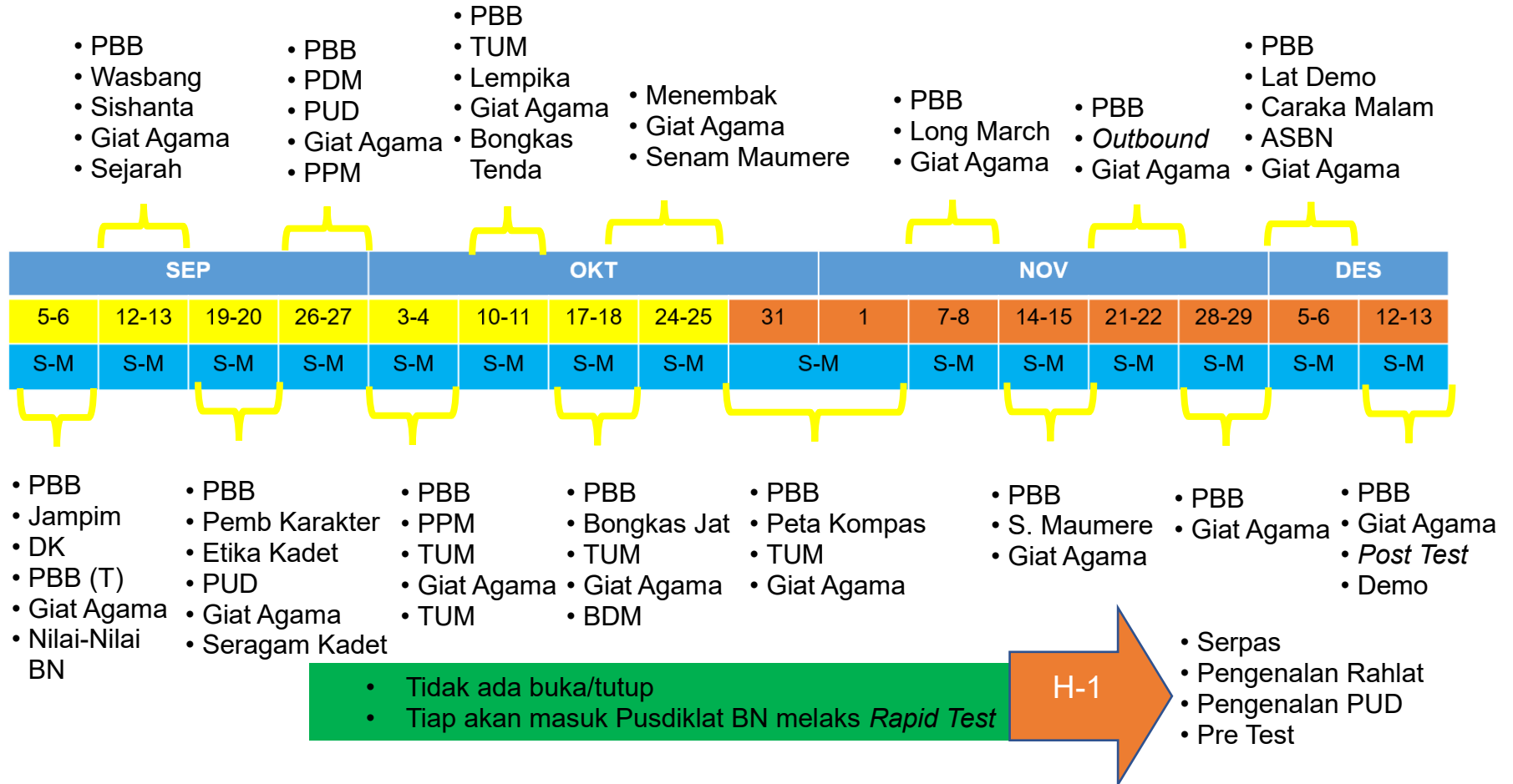
Sedangkan pada sasaran kaderisasi lingkungan masyarakat, pendidikan dan pelatihan dilaksanakan sesuai dengan anggaran pemerintah dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Salah satu program untuk lingkungan pemukiman adalah Mixed Program, disebut demikian karena peserta yang datang berasal dari berbagai daerah serta elemen masyarakat. Untuk Para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama ataupun Tokoh Pemuda dari organisasi-organisasi seperti Karang Taruna, mereka dapat mendaftar melalui Pemda atau Kesbangpol daerah masing-masing. Walaupun untuk saat ini pendaftaran tersebut masih terbatas pada wilayah jabodetabek. Pusdiklat Bela Negara kerap kali melakukan sosialisasi kepada Pemda-Pemda sekitar terkait tokoh masyarakat yang dapat diarahkan untuk mendaftarkan diri dalam Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Bela Negara.

Untuk dapat mengakomodasi perbedaan kebutuhan Diklat dari ketiga lingkungan masyarakat tersebut. Pusdiklat Bela Negara membuat Agenda program Diklat yang menjadi dasar pelaksanaan operasionalnya. Pada tahun 2020 lalu, terdapat 10 Program Diklat yang menjadi dasar program pelaksanaan tahun tersebut, yaitu;

- a. Program Diklat Kader Bela Negara Gabungan
- b. Diklat Kader Bela Negara bagi PNS Mabes TNI dan Angkatan Golongan I dan II
- c. Diklat Kaer Pembina Bela Negara Tingkat Madya Bagi PNS Kemhan
- d. Diklat Kader Pembina Bela Negara Tingkat Pertama Bagi PNS Mabes TNI dan Angkatan



## Pendidikan Dasar Bela Negara S2 Universitas Pertahanan Indonesia



**Tabel 4.4** Agenda Pendidikan dan Pelatihan Non Program untuk S2 Universitas Pertahanan 2020

Agenda Pendidikan dan Pelatihan Non Program untuk S2 Universitas Pertahanan 2020

**RANGKA PELAJARAN POKOK (RPP)**

Nama Diklat : Diksar Kader Bela Negara bagi Mahasiswa Baru Program S2 Unhan  
 Kode Diklat : 40114  
 Lama Diklat : 12 Hari, 96 Jam Pelajaran @ 45 Menit  
 Kegiatan : Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru ( PKKMB)  
 Pendekatan Pembelajaran : Andragogi

NOMOR		MATERI DIKLAT	BOBOT (%)	JAM PELAJARAN			KATEGORI	
				JUMLAH	T/C	P/D		
URUT	KODE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I.</b>		<b>BIDANG STUDI DASAR</b>	<b>29%</b>	<b>28</b>				
1.	1001	Pengantar Bela Negara			2	2	-	Penting
2.	1002	Wawasan Kebangsaan (Empat Konsensus Dasar Bangsa)			3	3	-	Penting
3.	1003	Sistem Pertahanan Semesta			2	2	-	Penting
4.	1005	Kepemimpinan Berwawasan Bela Negara			2	2	-	Penting

5.	1004	Sejarah Perjuangan Bangsa			2	2	-	Penting
6.	1006	Bahaya Narkoba dan Penanggulangnya			3	3	-	Penting
7.	1007	Bahaya Terorisme dan Radikalisme serta Penanggulangnya			3	3	-	Penting
8.	1014	Pembangunan Karakter Bangsa			3	3	-	Penting
9.	1023	Undang-Undang ITE			2	2	-	Penting
10.	1018	<i>Proxy War</i>			2	2	-	Penting
11.	1012	Manajemen Krisis			2	2	-	Penting
12.	1022	Pengetahuan tentang Kesadaran Wajib Pajak			2	2	-	Penting

1		2	3	4	5	6	7	8
<b>II.</b>		<b>BIDANG STUDI INTI</b>	<b>60%</b>	<b>58</b>				
1.	2001	SBS. Nilai-Nilai Dasar Bela Negara			5	3	2	Mutlak
a.		Cinta Tanah Air						
b.		Kesadaran Berbangsa dan Bernegara						
c.		Setia pada Pancasila sebagai Ideologi Negara						

d.		Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara						
e.		Kemampuan Awal Bela Negara						
2.		SBS. Keterampilan Dasar Bela Negara						
a.	2002	Dinamika Kelompok			4	-	4	Mutlak
b.	2033	Keterampilan Bela Negara ( <i>Outbound</i> )			8	-	8	Mutlak
c.	2007	Peraturan Baris Berbaris			6	-	6	Mutlak
d.	2008	Keprotokolan			4	-	4	Mutlak
e.	2003	Kewaspadaan Dini			3	2	1	Mutlak
f.	2006	Penanganan Bahaya Kebakaran dan Penanggulangan Bahaya Bencana Kebakaran			5	2	3	Mutlak
g.	2045	Pengetahuan tentang Bencana Kesehatan Pandemi Covid-19 dan Penanggulangannya			3	2	1	Mutlak
h.	2016	Pengetahuan Etika			3	2	1	Mutlak
i.	2011	Bela Diri			5	-	5	Mutlak
j.	2046	Bongkar Pasang Tenda			5	-	5	Mutlak
k.	2012	Caraka Malam			5	-	5	Mutlak
l.	2013	Api Semangat Bela Negara			2	-	2	Mutlak

1		2	3	4	5	6	7	8
<b>III.</b>		<b>BIDANG PENDUKUNG</b>	<b>11%</b>	10				
1.	3001	Muatan Lokal			2	2	-	Faedah
2.	3004	Bimbingan dan Pengasuhan (demo)			6	-	6	Faedah
3.	3008	Upacara Pembukaan/Penutupan			2	-	2	Faedah
		<b>Jumlah Jam Pelajaran</b>	<b>100%</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>41</b>	<b>55</b>	

**Tabel 4.3** Kerangka Pelajaran Non Program S2 Universitas Pertahanan 2020

Untuk kegiatan yang bersifat praktek atau lapangan, Kegiatan pelatihan tersebut dibimbing oleh seorang pelatih yang akan bertindak sebagai pembimbing dan asuh (bimsuh) bagi para Kader tersebut. Mereka akan dibimbing mulai dari bangun tidur, proses latihan lapangan hingga proses makan. Tujuannya adalah untuk menanamkan sikap Disiplin dan Peka para calon Kader Bela Negara tersebut. Dalam bentuk tabel timeline pendidikan, maka dapat dibuat alur proses sebagai berikut;

**Tabel 4.6** Proses Belajar Non Program S2 Universitas Pertahanan 2020

(Sumber: Pusdiklat Bela Negara)



Dalam memberikan pendidikan yang maksimal kepada para calon kader Bela Negara tersebut, selain menggunakan para tenaga pendidik ahli di internal Pusdiklat Bela Negara (Widyaiswara), banyak tenaga diklat

profesional yang juga didatangkan dari instansi lain untuk mengisi kelas-kelas pendidikannya, yaitu :

- Kementerian /Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah yang mengirim Peserta
- Lemhannas
- Unhan
- BNN
- BNPT
- BNPB
- Basarnas
- TNI (Pusjarah TNI)
- Polri
- Dirjen Pothan, Dirjen Strahan Kemhan
- Yayasan Jatidiri Bangsa
- Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan
- Dinas Kebakaran Kab Bogor
- Dosen/Guru yang telah mengikuti TOT
- Tenaga Ahli dan Profesional, dan lain sebagainya.

Dengan Kesadaran Bela Negara yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat melalui Diklat Bela Negara. Maka Pemerintah secara tidak langsung mendorong warganya untuk berpartisipasi dalam menangkal ancaman-ancaman yang merusak sistem dan keamanan di tengah-tengah kehidupan bernegara. Terutama ancaman yang masuk dari lingkungan eksternal yang mempengaruhi keamanan internal negara seperti penyalahgunaan narkoba, terorisme dan banyak hal lainnya.

Untuk saat pandemi ini, secara operasional pendidikan dan pelatihan, disaat sistem pendidikan lain sudah menerapkan sistem pendidikan online. Pusdiklat Bela Negara tidak dimungkinkan untuk ikut melaksanakannya. Maka

dari itu terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya ditunda atau dibatalkan selama Pandemi Corona Covid-19.

Bela Negara itu kuncinya mewujudkan nasionalisme dan patriotism. Saat ini tidak bisa dilakukan secara online tetapi yang klasikal karena ga mungkin melaksanakan PBB secara online. Akan kehilangan unsur Disiplin dan pembangunan karakternya.

Pusdiklat Bela Negara saat ini memiliki beberapa program atau non program yang tetap berjalan dengan pembatasan dan protokol kesehatan yang sangat. Mulai dari penjagaan jarak, pengukuran suhu dan lainnya. Pembatasan jarak selama masa Diklat mengurangi jumlah peserta dalam kelas sekitar 50% nya. Pendidikan dan pelatihan Bela Negara harus tetap berjalan dalam membangun karakter Bela Negara.

#### **4.2.1.2 Perbedaan Pusdiklat Bela Negara dengan institusi lain yang melaksanakan Diklat Bela Negara**

Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Nasional dilakukan dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan Bela Negara kepada warga negara Indonesia sebagai Sumber Daya Manusia untuk menjadi Kader Bela Negara. Karakter Bela Negara yang diharapkan adalah Kader Bela Negara yang memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme sebagai warga negara Indonesia. Menekankan pada sikap disiplin, empati dan peka. Sistem pendidikan dan pelatihan tersebut dirasa perlu karena dapat menanamkan sikap disiplin. Disiplin sangat diperlukan untuk memberikan perubahan pada karakter seseorang. Dalam sebuah percakapan dengan salah seorang pelatih Bela Negara, Kapten Inf. Dr. Teguh Anggoro, S.I.P., M.Sc.

Banyak dari peserta pelatihan yang bilang sangat ada perubahan, karena mereka mengakui dan berkesan dengan pelathan di sini. Memang kita disini bukan latihan militer, hanya menanamkan wawasan kebangsaan tentang bela negara, salah satunya dari bangun tidur, solat, bahwa ibadah itu sifatnya harus, wajib. olahraga,

segala macam. ada jam-jam bimsuh, kita kasih teori sebentar supaya mereka paham. Kemudian lebih banyak praktek dan teknis-teknis supaya mereka cepat nangkap, lalu cara memimpin dalam kelompok atau perorangan.

Perubahan tersebut muncul karena banyaknya kegiatan pelatihan yang berdasarkan atas paraktek dari materi dan penanaman jiwa disiplin selama kegiatan. Pelatihan dilaksanakan agar karakter bela negara tersebut tertanam pada mental para calon kader.

Dengan 3 hari berjalan bisa berjalan efektif, secara teknis kita tidak terlalu banyak teori, kalo banyak teori kan tidak kena. Dari cara berjalan, dari perpindahan tempat, dari situ sudah terlihat, kalo tidak rapih dihentikan, kemudian diajarkan dulu secara langsung saja. Berbeda dengan militer. Kita mendidik mereka etika salah satunya etika ruang belajar (kelas) dan etika di ruang makan. Jikapun ada reward and punishment, tidak akan seperti militer, sangat berbeda.

Tugas dan fungsi yang dijalankan oleh Pusdiklat Bela Negara dalam menjalankan pendidikan dan pelatihan tidak lepas dari peran Widyaiswara dan Pelatih. Tidak seperti Widyaiswara, jumlah pelatih sebagai bagian ini dari proses pelatihan, secara riil belum memenuhi tandar personil yang sudah ditetapkan.

Personil secara ideal masih 50% dari jumlah yang ada, sesuai dengan DSP daftar susunan pegawai, harusnya 133, tapi yang terisi hanya 57 orang. Idealnya itu untuk menyelenggarakan kegiatan, Personil itu terpenuhi 70% minimal dari 133, artinya sekitar 90an orang baru bisa menyelenggarakan kegiatan ini. Sekarang, jika kita melakukan kegiatan dimana peserta kader di atas 100 orang, kita meminta personil dari rindam-rindam karena personil kita terbatas. Jadi kita meminta kekuatan dari angkatan laut, darat dan udara, disamping personil kita yang selain pelatih juga ikut terjun ke lapangan.

Proses pendidikan dan pelatihan tersebut dikatakan sangat berbeda dengan yang dilaksanakan oleh Resimen Induk Kodam (Rindam) di daerah-daerah, ataupun yang dilaksanakan oleh Diklat-diklat Bela Negara yang di luar

Pusdiklat. Karena kurikulum yang dibuat benar-benar khusus untuk membangun karakter Bela Negara, bukan sebuah pendidikan dasar militer dan bukan juga hanya murni teori tanpa penanaman dalam kehidupan nyata. Diinformasikan kembali oleh Kabid Opsdiklat Pusdiklat Belneg, Kolonel Inf Ade Kurnianto.

Jika kita lihat penyelenggaraan diklat belneg yang dilakukan rindam itu belum mengacu kepada kurikulum yang kita berikan, padahal pada saat rapat yang dihadiri oleh Dan Rindam seluruh Indonesia itu sudah kita sampaikan dan sudah kita berikan kurikulum kita, jadi kalo mereka melakukan diklat bela negara, ya ini yang sudah baku, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan diklat itu menyangkut kurikulum. tapi banyak yang mengabaikan, dan tidak sesuai dengan kurikulum yang ada. Dan kalo kita lihat pelaksanaan di rindam itu semacam diksarmil jadinya, padahal beda. Diklat bela negara dengan diksarmil kan beda.

Dikatakan bahwa pendidikan Bela Negara tidak dapat disamakan dengan pendidikan dasar militer (diksarmil) atau latihan dasar militer (latsarmil). Karena target pesertanya adalah warga sipil, bukan calon-calon militer. Tujuannya bukan membentuk tentara, tetapi adalah untuk menanamkan kesadaran Bela Negara kepada warga sipil agar mereka dapat berjuang demi pertahanan negara berdasarkan profesi atau kompetensinya masing-masing. Kemampuan fisik yang diberikan adalah kemampuan fisik untuk dasar bela negara, bukan dasar militer. Hal tersebut juga dipertegas kembali oleh Kabid Evkat Mutu Diklat.

Kalo di Rindam itu kebanyakan PBB, di pusdiklat beda, ada pengetahuan, keterampilan atau kemampuan-kemampuan lain yang diberikan.

Sama halnya dengan pendidikan dan pelatihan bela negara yang diadakan oleh selain Pusdiklat, seperti oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang mendirikan Akademi Bela Negara (ABN). Berbeda dengan Pusdiklat Bela Negara yang bertujuan untuk membentuk Kader Bela Negara,

Akademi ini cenderung ke arah kader muda investasi politik jangka panjang. Seperti dikutip dalam percakapan dengan Kapten Inf. Dr. Teguh Anggoro, S.I.P., M.Sc..

Nasdem itu tersendiri, mereka melakukan pendidikan bela negara khusus untuk partai mereka sendiri, kalo di luar partai kan tidak boleh. Dan didalamnya pun ada agenda kepentingan mereka sendiri.

Dalam pelaksanaan di Pusdiklat Bela Negara, Kader tidak hanya diberikan pendidikan dan pelatihan, tetapi juga dievaluasi. Proses Evaluasi dilaksanakan oleh Bidang Evaluasi Peningkatan Mutu Diklat (Evkat Diklat). Kemudian dibagi dua menjadi Evaluasi Lapangan Mutu Diklat (Evlap Mutu Diklat) dan Evaluasi Mutu Diklat. Pada Evlap Mutu Diklat, proses evaluasi dimulai secara monitoring yang dimulai sejak pertama peserta melaksanakan pendidikan hingga selesai acara penutupan Diklat.

Evaluasi terhadap siswa itu dilakukan monitoring, dari mulai jalan, makan, pokonya selama kegiatan, kita evaluasi mereka dengan monitoring. Evaluasi lapangan dilakukan terhadap siswa pada saat pendidikan berjalan. Begitu juga evaluasi terhadap WI yang mengajar. Kita beri semacam kuesioner kepada para siswa. Selama kader bela negara melaksanakan pendidikan, kita sebar kuesioner nya pada mereka. Apakah pendidikan atau pelatih para WI dan pelatih sudah mencapai kepuasan atau belum. Jika persentasi kepuasan siswa ternyata 70% kan berarti bagus.

Bahkan para pendidik dan pelatihnya pun dilakukan evaluasi lapangan agar mutu diklat nya selalu terjaga melalui perbaikan berkelanjutan yang dilakukan setiap tahunnya. Bagi Kader diberikan pre-post test, sedangkan pada widyaiswara dan pelatih akan menerima penilaian dari para kader terkait cara pendidikan dan pelatihan beserta kualitas materi yang disampaikan.

**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMHAN  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BELA NEGARA**

**PENJELASAN**

Dalam rangka meningkatkan mutu Diklat, kami mengharapkan kesediaan peserta untuk mengisi formulir evaluasi peserta Diklat terhadap penyelenggaraan Diklat. Tidak ada jawaban Benar atau Salah. Anda cukup melingkari huruf yang sesuai dengan apa yang dialami atau dirasakan selama belajar di Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan.

Satker: \_\_\_\_\_ H/rtgl: \_\_\_\_\_

**A. Kurikulum:**

1. Alokasi waktu pelaksanaan Diklat:
  - a. Sesuai
  - b. Cukup sesuai
  - c. Kurang sesuai
 Apabila kurang sesuai, alasannya: \_\_\_\_\_
2. Kesesuaian mata pelajaran/kegiatan yang diberikan dengan sasaran pendidikan:
  - a. Sesuai
  - b. Cukup sesuai
  - c. Tidak sesuai
 Apabila tidak sesuai, alasannya: \_\_\_\_\_

**B. Paket Instruksi:**

3. Kelengkapan paket instruksi yang diberikan:
  - a. Lengkap
  - b. Cukup lengkap
  - c. Kurang lengkap
 Apabila kurang lengkap, alasannya: \_\_\_\_\_
4. Tingkat pemahaman peserta terhadap paket instruksi yang diajarkan:
  - a. Paham
  - b. Cukup paham
  - c. Kurang paham
 Apabila kurang paham, alasannya: \_\_\_\_\_

**C. Tenaga Pendidik/Widyaiswara:**

5. Penguasaan materi dan penguasaan kelas:
  - a. Baik
  - b. Cukup baik
  - c. Kurang baik
 Apabila kurang baik, alasannya: \_\_\_\_\_

**Gambar 4.6** Contoh Lampiran Evaluasi Pelatih dan Pendidik  
(Sumber Pusdiklat Bela Negara)

Evlap Mutu Diklat melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sedang berjalan, mulai dari materi pembelajaran, kegiatan mahasiswa dari mulai berjalan, tidur, makan hingga kegiatan diklat, serta termasuk didalamnya penilaian kualitas Widyaiswara (WI). Hal-hal yang menjadi pertimbangan bagi Evlap Diklat dalam melakukan evaluasi adalah:

- Hasil Pre Test dan Post Test para peserta
- Evaluasi penilaian Widyaiswara (berupa angket kepada para peserta Diklat)
- Evaluasi Gara Diklat (berupa angket)
- Laporan Evaluasi Gara Diklat (10 Komponen Pendidikan)
- Laporan penilaian Widyaiswara
- Laporan Monitoring dan Evaluasi Diklat

- Monografi Diklat
- Jumlah Alumni Diklat
- Leaflet

Kegiatan Evaluasi merupakan hal yang sangat vital bagi sebuah kegiatan pendidikan dan pelatihan. Hal ini memastikan agar semua sumber daya yang dikerahkan guna melaksanakan proses tersebut dapat memperoleh hasil yang maksimal serta agar setiap aspek dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan mampu mengikuti perubahan atau perkembangan yang dibutuhkan. Guna memperoleh hasil maksimal tersebut, hal-hal yang dibutuhkan Pusdiklat dalam merangkum hasil dari laporan atau proses evaluasi tersebut untuk peningkatan mutu adalah;

- Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar
- Pelaksanaan Bimsuh (bimbing dan Asuh)
- Hambatan dan Upaya Mengatasi
- Tingkat Pencapaian Pendidikan
- Saran Pengembangan

Perihal proses evaluasi tersebut juga diutarakan oleh Kasubbag TU, Mayor Cba Sri Hartono.

Sebelum pelatihan itu, dilaksanakan dulu pre test, pengetesan awal sebelum siswa itu masuk dan post test saat mau tutup pendidikan, yaitu sehari sebelum acara penutupan. Jadi input dan outputnya itu harus ada sebelum penutupan itu.

Hal tersebut juga dipertegas oleh Penanggungjawab pelaksanaan Evaluasi di lapangan, salah satunya adalah Bapak Partoyo, S.E., Penyusun Naskah Evlap Diklat Bid Evkat Mutu Diklat.

Widyaiswara juga dievaluasi oleh siswa apakah baik atau tidak, WI nya bagus atau tidak, cocok atau tidak. Kalo nilai terlalu rendah berarti WI harus belajar lagi. Koordinator WI tidak berhak menilai WI tetapi dia berhak memilih WI di untuk mengajar. Selain Koordinator WI ada Koordinator Kelas yang mengatur dan mengurus WI serta para siswa

di kelas, sekaligus memantau keadaan kelas. Mereka harus menunggu hingga kelas selesai. Koordinator kelas bertanggungjawab kepada KabidOps Diklat, jadi Kabid Ops Diklat berhak menegur jika mereka ada salah.



**Gambar 4.7** Gambaran proses Pretest – Posttest  
(Sumber Pusdiklat Bela Negara)

Evaluasi tersebut hasilnya akan digunakan sebagai bahan peningkatan mutu bagi pendidik, pelatih dan bagi materi-materi yang diberikan nantinya pada tahun ajaran selanjutnya. Perbaikan materi pembelajaran ini kemudian menjadi tanggungjawab Pusdiklat bela negara Bidang Operasional Pendidikan dan Pelatihan (Opsdiklat). Dimulai dari segi pengerjaan dan penyampaian materi tersebut kepada para calon kader bela negara. Kemudian materi-materi tersebut, pada tahun ajaran selanjutnya akan kembali dievaluasi secara berkala. Evaluasi tersebut dilakukan agar Pusdiklat dapat selalu menjaga kualitas pendidikan dan pelatihannya serta mengembangkan materi pembelajarannya untuk selalu sesuai dengan perkembangan ancaman pertahanan negara Indonesia. Evaluasi Mutu Diklat selanjutnya adalah

Evaluasi Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pelatihan (Kat Mutu Diklat). Evaluasi ini ditujukan kepada para para kader Bela Negara yang berhasil lulus dari Pusdiklat Bela Negara. Alumni Kader Bela Negara yang berhasil lulus adalah alumni yang mendapatkan kartu Kader dari Badiklat Kemhan, serta sertifikat dan pin bela negara yang resmi dan tidak bisa didapatkan dari lembaga-lambaga lain yang melaksanakan diklat bela negara.



**Gambar 4.8** Contoh Sertifikat  
(Sumber Pusdiklat Bela Negara)



**Gambar 4.9** Contoh Pin  
(Sumber Pusdiklat Bela Negara)

Pada proses Evaluasi Peningkatan Mutu bagi Pusdiklat Bela Negara atau yang biasa disebut dengan Evaluasi Pasca Diklat. Pada saat ini sebenarnya belum ada proses evaluasi yang pasti atau dapat dihitung secara kuantitatif. Padahal proses ini penting untuk melakukan penilaian seberapa jauh hasil pendidikan dan pelatihan bela negara bagi mereka agar mampu berperan dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme kedalam kehidupan sehari-harinya, dibandingkan dengan saat pertama memulai diklat. Evaluasi Pasca Diklat para alumni Pusdiklat Bela Negara, pertama kali dilakukan pada Desember 2019 dan belum dilaksanakan lagi semenjak itu. Proses evaluasi ini diperkirakan dilaksanakan di Jawa Timur (Surabaya) oleh Badiklat Kemhan dan ditujukan kepada para alumni kader Bela Negara yang berlokasi di daerah Surabaya dan sekitarnya. Namun dalam pelaksanaannya koordinasi diantara keduanya

masih belum maksimal. Menurut Kasubbid Kat Mutu Diklat Bid Evkat Mutu Diklat Pusdiklat Bela Negara Badiklat Kemhan, Kunto Setiadji, S. Pd., M.M.

Untuk Evaluasi Alumni, kemarin karena bukan kita yang berangkat, kita tidak pegang berkasnya. Yang kemarin berangkat kalo ga salah Bu Letkol Ririn. Orangnya dari Badiklat, karena dukungannya memang di sana. Harusnya hasilnya didorong ke sini karena ini kan evaluasi Pusdiklat Bela Negara. Kita tidak tau juga apa yang dievaluasi. Kita tidak tau juga isinya seperti apa. Itu dilakukan akhir tahun 2019, Desember. Pusdiklat Bela Negara baru sekali ini kemarin melakukan Pasca, kalo Pusdiklat yang lain sudah mainstream. Yang melakukan evaluasi itu Badiklat, kita tidak tau seperti apa lampiran evaluasinya. Tembusannya sudah sampai tapi belum ada kelanjutan proses koordinasi dengan badiklat.

Perhatian utama pada proses Evaluasi perdana mutu Bela Negara kepada para alumni ini adalah bahwa bidang Evkat Diklat sama sekali tidak dilibatkan. Tim evaluasi Diklat Bela Negara tidak ikut serta berangkat ke kota Surabaya untuk melakukan Evaluasi ataupun mengetahui seperti apa proses evaluasi tersebut dilaksanakan. Seluruh proses Evaluasi dilaksanakan oleh Badiklat Kemhan. Proses evaluasi Pasca Diklat tersebut dilaksanakan berdasarkan beberapa pertimbangan berdasarkan kebijakan pimpinan, dapat diputuskan di daerah yang memiliki alumni terbanyak atau daerah alumni kader Bela Negara terjauh.

#### **4.2.2 Pengembangan Pusdiklat Bela Negara sebagai bagian dari Usaha Pertahanan Negara**

Negara Indonesia yang berpenduduk 270.20 juta jiwa (SP 2020, Bps.go.id) memiliki hanya 14.934 orang alumni Kader Bela Negara (data hingga November 2020). Dengan kapasitas efektif Pusdiklat Bela Negara adalah sebanyak 368 orang untuk satu kali angkatan dan rata-rata jumlah angkatan per tahun adalah 17 – 74 angkatan (sebelum Covid-19). Maka hal ini

menunjukkan bahwa dalam satu angkatan diklat hanya terdapat sekitar 50 – 300 orang dalam satu gelombang angkatan. Jika dihitung berdasarkan data-data tersebut, maka rasio jumlah kader bela negara Pusdiklat Bela Negara dengan jumlah penduduk Indonesia adalah 1,8 juta banding 1 (1,8 juta:1). Artinya hanya terdapat 1 orang kader Bela Negara untuk 1,8 juta warga Indonesia. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa jumlah kapasitas Pusdiklat Bela Negara ini dirasa tidak dapat mengakomodasi kebutuhan negara dalam melakukan investasi terhadap peningkatan Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan pertahanan melalui Bela Negara. Atau kurang lebih jumlah kader Bela Negara yang ada sekarang dari Pusdiklat Bela Negara hanya sekitar 0,00006% dari jumlah Penduduk Indonesia. Terutama jika jumlah setiap angkatan tidak selalu mencapai kapasitas efektif nya. Dalam setiap angkatan hanya berjumlah sekitar 50 – 300 orang.

Menurut Kabid Opsdiklat Pusdiklat Belneg Kolonel Inf Ade Kurnianto, kapasitas dari sarana dan prasarana diharapkan untuk dapat ditingkatkan agar bisa setidaknya mencapai 1000 orang untuk setiap angkatan, dikarenakan animo masyarakat sangat tinggi untuk mengikuti pendidikan Bela Negara dan Pusdiklat tidak dapat menerima semuanya karena bukan hanya karena dibatasi oleh anggaran, tetapi juga oleh kapasitas kelas pendidikan dan asrama kader.

Kalo kita lihat keadaan secara riil sekarang ini, intinya kami sudah bisa menyelenggarakan diklat, tapi secara ideal itu belum. Kenapa karena ada beberapa fasilitas yang perlu beberapa penambahan. kapasitas ruang makan kan bisa menampung 1000 orang, jadi untuk kedepannya bahwa messing putra dan putri ada penambahan agar jika ditotal dapat menampung 1000 orang secara Bersama-sama. Untuk fasilitas lain untuk keterampilan bela negara sudah memenuhi persyaratan atau mendekati ideal. Kemudian dari sisi ruang kelas, kapasitas aula itu 300. adapun kelas sedang yg kapasitas 50 orang itu kita butuh 5 agar bisa melakukan kelas secara paralel.

Seperti yang sudah dijabarkan pada gambaran umum mengenai program dan non program dalam kalender kegiatan Pusdiklat. Jika dilihat, animo paling besar adalah melalui non-program yang melakukan kerjasama melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS). Hal ini menunjukkan bahwa potensi untuk mengembangkan Pusdiklat Bela Negara untuk memenuhi tidak hanya agenda pertahanan negara, tetapi juga memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pengembangan kompetensi karakter diri. Perbandingan antara peserta program adalah sebanyak 2.005 peserta dan peserta non-program sebanyak 12.929 peserta (data terakhir 13 November 2020).

#### **4.2.2.1 Pengembangan Organisasi Pusdiklat Bela Negara Sebagai Nilai Strategis dalam Usaha Pertahanan**

Pusat Pendidikan Bela Negara saat ini hanya memiliki satu lokasi pendidikan dan pelatihan, yaitu di Desa Cibodas, Kecamatan Rumpin, Bogor. Secara sarana dan prasarana, Pusdiklat ini sudah dilengkapi dengan mess atau asrama yang memiliki kapasitas efektif kader putra sebanyak 264 orang dengan kapasitas maksimal 428 orang. Sedangkan kapasitas efektif mess putri adalah 96 orang dengan kapasitas maksimal 200 orang. Total kapasitas efektif untuk barak para kader adalah 360 orang dengan kapasitas maksimal adalah 628 orang (dengan menggunakan ranjang tingkat dan tanpa ada penggunaan lemari pakaian serta meja kursi belajar). Namun, selama pandemi Corona Covid-19, proses pendidikan dan pelatihan dibatasi menjadi sebanyak 150 orang agar tetap mengikuti protokol kesehatan. Fasilitas pendidikan dan pelatihan lain yang digunakan adalah;

- Ruang Kelas kecil : kapasitas 50 orang (25 orang selama masa pandemi)
- Gedung aula untuk kelas besar : kapasitas 200 orang dengan maksimal 300 orang (98 orang selama masa pandemi)

- Kelas lapangan : kapasitas maksimal 300 orang
- Kelas Lapangan Rooder : Kapasitas 1000 orang
- Area pelatihan keterampilan Bela Negara
- Ruang Makan Kader Bela Negara : 500 orang (maksimal 1000 orang)
- Masjid At Taqwa : 300 orang
- Poliklinik : 30 orang



**Gambar 4.10** Mess Putra  
(Sumber Pusdiklat Bela Negara)



**Gambar 4.11** Mess Putri  
(Sumber Pusdiklat Bela Negara)



**Gambar 4.12** Ruang Kelas Kecil  
(Sumber Pusdiklat Bela Negara)



**Gambar 4.13** Ruang Kelas Aula  
(Sumber Pusdiklat Bela Negara)

Walau sarat dengan manfaat dan peminat, alokasi peserta dibatasi karena faktor kapasitas efektif dari Pusdiklat Belneg serta faktor anggaran.

Seharusnya seluruh Indonesia kita berikan bela negara, tetapi kembali kepada anggaran. Kita maunya supaya mereka semua bisa merasakan bela negara yang sesungguhnya diterapkan gimana. Karena kan disini diberikan berbagai macam materi-materi praktek dan pengetahuan. Memang kalo di rindam juga ada tapi kan beda dengan di Pusdiklat.

Ada perwakilannya aja dulu, selama ini kita hanya pendidikan kader-kader inti saja dulu tapi belum semuanya karena kan tidak bisa semuanya sekaligus. Pendidikan seluruh 34 provinsi itu kan tidak gampang. Setahun aja kita bisa mendidik paling banyak 2 provinsi. Itupun kalo tidak ada covid.

Hal itu muncul dari percakapan dengan Kabid Evkat Mutu Diklat. Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut, dapat dilihat bahwa untuk wilayah Lingkungan Pendidikan dan Lingkungan Pemukiman, kaderisasi bela negara yang dapat dijangkau oleh Pusdiklat bela negara saat ini masih terbatas. Lanjutnya lagi, Pusdiklat saat ini untuk lingkungan pemukiman, masih terbatas pada lingkungan Jabodetabek.

khusus pemukiman tidak semuanya, hanya sekitar jabodetabek saja, beberapa ormas2 yang kira2 bisa kita latih sebagai kader bela negara kita minta ke Pemda, jadi Pemda yg nujuk, bukan kita yg minta, hanya perwakilan-perwakilan daerah karena tidak bisa semuanya. luar belum bisa karena anggaran. sebatas pada wilayah Jabodetabek.

Hal inipun dipertegas oleh Kabid Rendiklat, Kolonel Inf Afson Riswandi Sirait, S.E. saat sedang membahas terkait pendaftara Kader Bela Negara.

Jika ada umum mendaftar bisa, banyaknya masih didaerah sekitar-sekitar sini, Bogor dan sekitarnya. Nanti daftar lewat Pusdiklat yang Diklat Gabungan ke Bu Tarmi, ga dipungut biaya, gratis. Nanti kita olah, kita laporkan ke pusat, surat tidak ada kendala langsung disetujui. Birokrasinya tidak sulit. Tapi kita harus lihat aspek alokasi, jika ada permintaan pihak lain itu berarti kita harus pertimbangkan lagi. Diklat belneg kita itu peminatnya banyak sampai kita tidak bisa nampung, alokasi terbatas karena kaitannya dengan anggaran.

Pelaksanaan Pendidikan dan Bela Negara sebenarnya sudah tertulis merupakan tugas dan fungsi Pusdiklat Bela Negara Kemhan, seperti yang tertulis di dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan. Untuk perluasan jangkauan pelatihan Bela Negara menjadi seluruh Indonesia, diperlukan sebuah wadah bagi Pusdiklat untuk bergerak dan berkoordinasi di daerah-daerah. Seperti yang dutarakan oleh Kasubbid Fasdiklat Bid Opsdiklat Pusdiklat Belneg Pak Sudarno S.Sos.

Pusdiklat itu tidak bisa bergerak didaerah, kalo mau bergerak nanti caranya bagaimana, lalu namanya apa? Ini kan sudah pusat, kita kan dibawah badiklat kemhan. Harus ada wadahnya itu nanti, bukan Pusdiklat yang langsung di daerah.

Setelah didiskusikan juga hal ini dengan Kabidops Pusdiklat Belneg mengenai wacana dengan Rindam Jaya di daerah untuk melakukan koordinasi untuk menempatkan personil dalam rangka kerja sama agar kurikulum Pusdiklat dapat digunakan di daerah untuk pendidikan dan pelatihan bela negara, ditegaskan kembali bahwa itu juga sangat tidak memungkinkan.

Pada tahun 2019, waktu itu seluruh Dan Rindam mengikuti rapat di Pothan, dihadiri oleh Menhan sebelumnya Pak Ryamizard terkait untuk menyamakan persepsi. Yang harus kita pahami bahwa Pusdiklat adalah salah satu pelaksana, jadi kita sifatnya melaksanakan apa yang menjadi kebijakan dari pimpinan, jadi dalam hal ini Pusdiklat Belneg tidak bisa masuk ke rindam-rindam, apalagi untuk menempatkan personilnya disana sebagai fasilitator ataupun sebagai pengawas.

Untuk itu peneliti melakukan penelitian ke Biro Ortala Kemhan untuk melakukan pendalaman mengenai bagaimana Pusdiklat Bela Negara dapat bergerak di daerah untuk menjalankan fungsi pertahanannya melalui Pembangunan Karakter Bela Negara. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa Pusdiklat yang bergerak dibawah Badiklat Kemhan, di daerah tidak dapat

bergerak sendiri. Harus memiliki induk yang dapat membantunya melakukan koordinasi dan pendidikan serta pelatihan di daerah-daerah. Hal ini pun dijelaskan dengan terperinci oleh Kasubbag Kelembagaan Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan Biro Ortala Setjen Kemhan, Letkol CAJ (K) Niniek Irawati.,S.E. M.M.

Bela Negara itu ada di bawah Pothan, karena memang bela negara adalah bagian dari potensi. Sehingga di struktur nya ga mungkin berdiri sendiri, tapi yang paling memungkinkan adalah berada dibawah satu struktur kaknwil yang dibawahnya ada kapid-kapid, lalu bela negara diramu dan dimasukkan ke situ.

Namun Kementerian Pertahanan saat ini tidak memiliki Kantor Wilayah di daerah-daerah, bahkan yang sifatnya strategis di perbatasan negara. Hal ini juga diungkapkan oleh Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan Biro Ortala Setjen Kemhan, Kolonel Jati Bambang P. S.IP, M.AP.

Secara organisasi, kemhan itu tidak punya kanwil di daerah walau secara regulasi boleh. tapi Presiden itu belum setuju. Seharusnya ada yang dikepalai oleh brigjen ada yang dikepalai oleh Kolonel. Tergantung wilayahnya, kalo yang berada di wilayah perbatasan dipegang oleh brigjen. Padahal sebenarnya disetiap provinsi sudah berjalan juga kegiatan bela negara sebagai perwakilan yang mengkoordinasikan dengan rindam dan lainnya. Kedepan mungkin bisa dibentuk lagi secara resmi, tapi bisa ada arahan kesitu itu.

Disebutkannya lagi bahwa di daerah-daerah sangat diperlukan unsur pembangunan karakter Bela Negara. Kegiatan unsur-unsur Bela Negara yang disebutkan, menurut Bapak Kolonel Jati, dulu pernah dijalankan oleh perwakilan kemenhan di daerah, namun belum berbentuk Kanwil. Keberadaan personil-personil yang dulu menempati posisi-posisi perwakilan Kemenhan didaerah saat ini sudah ditarik kembali. Saat itupun posisi mereka masih terbatas berada di lokasi-lokasi perbatasan atau di provinsi yang memiliki tanggung jawab besar.

Padahal itu sangat bermanfaat sebetulnya, Cuma aturannya saja tidak disetujui oleh presiden karena itu belum perlu, kan itu pertimbangannya biayanya banyak karena harus bangun kantor diseluruh provinsi, bangun ini bangun itu, saat ini ekonomi sedang sulit, padahal tidak juga karena sampai saat ini sebenarnya sudah berjalan. Tapi secara regulasi hukum belum sah saat itu karena belum ada aturan secara perpress bahwa ada kanwil di daerah. cuma ya itu kebijakan. Untuk unsur Bela Negara, mereka itu mendidik universitas ini, SMA ini diminta pemda ini dan sudah jalan di provinsi-provinsi, termasuk agenda pothan yang koordinasi dengan mereka dan membuat acara dari awal dari akhir.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Kolonel Jati, bahwa keberadaan Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan sendiri bagi Kemhan sudah ada dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan. Didalamnya terdapat fungsi-fungsi dan tanggungjawab Kanwil Kemhan sebagai salah satu garis pertahanan negara di daerah. Keberadaanya pun tertera di dalam Susunan Organisasi Kementerian Pertahanan, yaitu Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan. Menurutnya juga.

Tidak semua Kementerian bisa memiliki Kanwil, tapi sesuai peraturan Kementerian Pertahanan bisa, hanya saja pelaksanaannya belum disetujui. Kedepan kalo presiden memandang perlu bisa dibentuk lagi sebagaimana kementerian lain memiliki kanwil. Itu keputusan politik negara. Yang utama adalah komitmen pemangku kebijakan ada atau tidak, yaitu presiden dan DPR selaku pemilik mandat, yang berkuasa untuk memutuskan perlu atau tidak. Termasuk menteri sendiri.

Keberadaan Kanwil Kemhan ini dinilai sangat penting, terutama bagi daerah perbatasan atau daerah rawan konflik. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, Kepolisian, Rindam dan lembaga-lembaga lainnya baik lembaga negara atau lembaga masyarakat serta swasta dalam usaha pertahanan dan keamanan di daerah. Terutama dalam mendukung Pusdiklat

Bela Negara dalam melakukan pelatihan dan pendidikan Kader Bela Negara di daerah. Dalam pelaksanaan Pusdiklat di daerah melalui Kanwil, menurut Letkol CAJ (K) Niniek, pelaksanaannya nantinya berada dibawah bidang Potensi Pertahanan dan Badan Kemhan dan untuk personil Pusdiklat Bela Negara yang nantinya ditempatkan di daerah menurutnya juga bisa Kolonel atau Letnan Kolonel.

Pusdiklat bela negara sendiri itu kan isinya bidang perencanaan pendidikan, bidang operasi pelaksanaan pendidikan dan evaluasi. Nanti subidnya akan mengerjakan pelaksanaan program anggaran, laporan, program pendidikannya, materi dan lain sebagainya. Nanti bisa saja disananya dibuat setingkat Kolonel atau Letnan Kolonel. Nanti harus dirumuskan dulu tugas dan fungsinya, seberapa besar beban kerjanya.

Hal tersebut juga tergantung dari beban kerja atau tingkat tanggung jawab Kanwil. Karena setiap Kanwil yang akan memimpin bisa saja berbeda tergantung wilayahnya. Bisa setingkat Brigjen atau setingkat Kolonel. Untuk wilayah perbatasan biasanya setingkat Brigjen.

Pentingnya pembangunan Kanwil di daerah bukan hanya untuk mendukung kegiatan Pusdiklat Bela Negara dalam membangun karakter nasionalisme dan patriotisme, Tetapi Kanwil juga memiliki fungsi lain di daerah yang sudah tertuang di dalam Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2018.

Tidak hanya nanti tugas bela negara disitu, tetapi tugas fungsi kita di daerah juga nanti bisa menjembatani. Bela Negara di Pusdik itu bisa sekalian mengembangkan bela negara di daerah. Kanwil itu istilahnya perpanjangan tangan Kementerian Pertahanan terhadap situasi-situasi di daerah supaya kita menjalankan tugas dan fungsi yang ada di Permen. ada renhan, disjenranhan, kantor kecil yang menjalankan fungsi-fungsi disini juga, tapi bisa juga nanti kegiatan belneg dilakukan di wilayah-wilayah ada yang bantu, ada induknya. Bisa diselipkan juga belneg daerah, koordinasi dengan rindam kodam, bersinergi.

Disebutkannya lagi oleh Letkol CAJ (K) Niniek, bahwa Keberadaan Bela Negara di daerah itu penting untuk menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme. Jika di daerah-daerah dapat dilakukan pendidikan dan pelatihan Bela Negara, maka kegiatan di daerah-daerah dapat dilaksanakan dengan simultan dan cakupan yang lebih luas. Disebutkannya juga sebagai Kasubbag Kelembagaan Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan Ro ortala Setjen Kemhan bahwa walaupun Pusdiklat memiliki cakupan wilayah operasional pendidikan dan pelatihan yang luas hingga ke daerah-daerah, untuk jabatan yang mengembannya tetap harus bintang satu. Karena Pusdiklat berada di bawah Badiklat dan Jabatan Kabadiklat Kemhan adalah bintang dua.

Pusdiklat tetap harus bintang satu karena berada dibawah bintang dua, kecuali dia berubah menjadi badan sendiri, bukan pusat. Dibawah Badiklat ada banyak pusat-pusat. Berarti di daerah eselon nya akan menjadi lebih rendah lagi, yaitu Kolonel, Cuma nanti kakanwil nya sendiri nanti bisa bintang satu.

Dengan banyaknya ancaman-ancaman yang mencoba mengobarkan bibit radikalisme dan terorisme di Indonesia, banyak bibit-bibitnya besembunyi di daerah-daerah bahkan terkadang muncul konflik yang bernuansa rasis. Dengan Keberadaan Rindam dan Kepolisian di daerah tidak cukup, diperlukan dukungan masyarakat untuk menjaga pertahanan dan keamanan di daerah. Disinilah peran Pembangunan karakter Bela Negara. Kurang lebih seperti itu yang didapat dari percakapan dengan Kapten Inf. Dr. Teguh Anggoro, S.I.P., M.Sc.

Di daerah-daerah kan ada Rindam-Rindam dan mereka melakukan pendidikan bela negara sendiri. Tetapi kenapa konflik masih ada, begitukan. Makanya peran serta masyarakat untuk menjaga pertahanan diperlukan.

Begitu penting nilai-nilai strategis Pendidikan Bela Negara yang ditujukan khusus untuk pembangunan karakter patriotisme dan nasionalisme

di daerah-daerah. Dan itupun tidak mungkin dapat diakomodasi oleh Pusdiklat Bela Negara dalam keadaannya yang saat ini.

Karena Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara ini jangka panjang, sekarang mungkin belum terasa tetapi nanti terasa, jika negara dalam keadaan genting atau nanti pada dibutuhkan kita sudah siap. Kalo ga disiapkan dari sekarang lalu nanti bagaimana?

Kemenhan juga dipandang perlu untuk memberdayakan para Kader Bela Negara untuk usaha pertahanan, termasuk di daerah-daerah yang pertahanan dan keamanannya lebih rawan. Hal ini muncul dari wawancara dengan dengan Kasubid Demonlat Bid Opsdiklat.

Pusdiklat Bela Negara sebatas mendidik dan melatih untuk membangun karakter, lalu kita serahkan sertifikat dan pin. Lalu para Kader Bela Negara tersebut oleh Pothan mau dikemanakan? Kan sayang, jadi harus bisa membantu tugas-tugas pemerintah dalam bidang pertahanan.

Hal ini secara strategis membutuhkan koordinasi dengan banyak pihak dalam pelaksanaannya di daerah-daerah, termasuk dengan Rindam di daerah. Karena Pusdiklat harus memikirkan untuk penambahan personil di saat personil saat ini, mereka masih kekurangan dalam melakukan operasional terutama untuk peserta di atas 100 orang. Kekurangan ini dikarenakan untuk tenaga pelatih dari TNI sendiri masih membutuhkan banyak personil, baik itu di Angkatan Darat, Laut dan Udara.

Sementara tenaga pelatih di kita sendiri itu kurang. Kita sudah berusaha, minta, kami sebagai susatker, diatas kami ada satker yaitu badiklat. Kami mengajukan ke Badiklat, lalu Badiklat mengajukan ke ropeg. Ropeg itu biro kepegawaian. Di setiap menteri ada biro kepegawaian. Biro kepegawaian kami kemudian mengajukan surat ke mabes tni, mabes tni nanti memecah surat ke angkatan darat, laut dan udara. Kami sudah meminta tapi personil belum masuk satupun. Dikarenakan di angkatan darat banyak pengembangan juga. Di daerah-daerah yang belum ada isi sekarang ada satuan-satuan baru. makanya angkatan darat juga sendiri masih kurang personilnya.

Hingga saat ini Pusdiklat, dengan segala keterbatasannya selalu mampu memberikan hasil yang maksimal dalam melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan Bela Negara. Kekurangan pelatih mampu ditutupi dengan menerjunkan personil-personil Pusdiklat di luar bidang Pelatihan untuk membantu dilapangan atau meminjam pelatih ke Rindam.

Dalam surat pemanggilan, kita mencantumkan kriteria bahwa sudah memiliki kemampuan sebagai tenaga pelatih, terlepas jika dikirimnya berbeda dengan itu. Mereka Nanti di sini akan menyesuaikan, jadi kami akan mengarahkan sebelum mereka terjun, bahwa di sini sifatnya membentuk sikap dan perilaku, bukan militer.

Peminjaman personil biasanya dilakukan jika peserta Diklat berada di angka 100 ke atas, dikarenakan sifatnya yang hanya sementara. Rindam-Rindam selalu bersedia untuk meminjamkan personilnya untuk sekitar 3-4 (tiga atau empat) hari.

#### **4.2.2.2 Keterlibatan Kementerian Selain Kemenhan, BUMN dan BUMS dalam pengembangan Pusdiklat Bela Negara**

Dengan sasaran tiga pilar lingkungan masyarakat, yaitu lingkungan pekerjaan, lingkungan pendidikan dan lingkungan pemukiman, lalu mempertimbangkan kemampuan kapasitas yang dapat di didik serta di latih oleh Pusdiklat Bela Negara serta jumlah warga negara Indonesia. Pusat Pendidikan Bela Negara yang sudah beroperasi selama 4 (empat) tahun ini, baru mampu melatih dan mendidik 14.934 Kader Bela Negara dari seluruh Indonesia (data November 2020). Secara detail jumlah kader yang sudah terealisasi dalam pelaksanaannya hingga saat ini dapat dirangkum pada tabel berikut:

**Tabel 4.7** Jumlah seluruh Alumni Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara  
(Sumber : Pusdiklat Bela Negara)

**JUMLAH ALUMNI DIKLAT KADER BELA NEGARA PUSDIKLAT  
BELA NEGARA BADIKLAT KEMHAN  
TAHUN 2017 S.D 13 NOPEMBER 2020**

No	Tahun	Jumlah Program		Jumlah Non Program		Program dan Non Program	
		Diklat	Alumni	Diklat	Alumni	Diklat	Alumni
1	Tahun 2017	-	-	17	2679	17	2679
2	Tahun 2018	12	940	38	3829	50	4769
3	Tahun 2019	15	790	59	6006	74	6796
4	Tahun 2020	6	275	4	415	10	690
<b>Total Tahun 2017 s.d 13 November 2020</b>		<b>33</b>	<b>2.005</b>	<b>118</b>	<b>12.929</b>	<b>151</b>	<b>14.934</b>

Dengan rincian Sumber Kader Non Program sebagai Berikut;

- Lembaga Keuangan Perbankan
  - Bank Indonesia
  - Bank Mandiri
  - Bank Rakyat Indonesia
  - Lembaga Penjaminan Simpanan (OJK)
  - Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Kementerian/Lembaga
  - Kementerian PUPR
  - Kementerian Sosial
  - Kementerian PAN RB
  - Kementerian Ristek Dikti

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kementerian Hukum dan HAM
- Kementerian Luar Negeri
- LAN
- BKN
- BPIP
- Mabes TNI/Angkatan
- Pemda
  - DKI Jakarta
  - Kabupaten Bogor
  - Kabupaten Tangerang
  - Kabupaten Bekasi
- Lingkup Pendidikan
  - UI, IPB, UPN, UIN, UNJ, Usada dan MHT
  - Krida Nusantara
  - Santo Petrus
  - Al Zikro dan Hindu Sikh

Jika dilihat dari tabel alumni Kader Bela Negara tersebut, maka dapat dilihat bahwa sebagian besar peserta Diklat Bela Negara adalah peserta Non-Program. Seperti yang sudah disebutkan dalam Agenda Pendidikan dan Pelatihan Pusdiklat Bela Negara, bahwa terdapat dua macam agenda pendidikan dan pelatihan dan, yaitu Program dan Non Program. Anggaran pendidikan dan pelatihan merupakan tanggungjawab yang diemban oleh instansi tersebut sebagai instansi yang menyerahkan personilnya untuk dididik dan dilatih oleh Pusdiklat. Dari wawancara dengan Kasubbid Progdiklat Bid Rendiklat Pusdiklat Belneg, Ibu Sutarmi, S.E.

Jadwal dan lama pendidikan yang akan ditempuh oleh peserta tersebut kemudian ditetapkan berdasarkan kesepakatan tertulis di dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pusdiklat dengan

BUMN/BUMD/BUMS. Dimana perjanjian tersebut harus dikirm dulu ke Badiklat untuk disetujui. Jika Badiklat setuju, maka kita langsung menjalankannya.

Pelaksanaan kegiatan Non-Program menggunakan landasan Pengelolaan Anggaran Swakelola Tipe-2. Merujuk pada Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018. Dalam Program Swakelola ini, instansi lain disebut sebagai Mitra atau sebagai pemegang anggaran. Pusdiklat saat ini hanya dapat menggunakan Tipe pembiayaan Swakelola Tipe-2 LKPP, belum memiliki ijin untuk menggunakan pembiayaan menggunakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Perbedaan dari PNBP dan Swakelola Tipe-2 yang dijalankan oleh Pusdiklat Bela Negara, ada pada anggarannya. PNBP untuk melaksanakannya sudah dikenakan tarif untuk setiap kegiatan. Sedangkan pada Swakelola Tipe-2, Pusdiklat membuat anggaran berdasarkan kesepakatan dengan Mitra (pemegang anggaran). Sehingga pada Swakelola Tipe-2, anggaran dapat dimodifikasi sesuai dengan kemampuan atau keterbatasan dana dari pemilik dana. Hal ini dijelaskan oleh Kasubbag TU, Mayor Cba Sri Hartono.

Kita masih berlaku penerimaan swakelola tipe 2 dari LKPP, untuk penerimaan peserta belum berlaku penerimaan non pajak. masih menggunakan budget biaya standar SBM, yaitu Standar Biaya Masuk dari kementerian keuangan. Kalo PNBP itu pake tarif, kita belum dapat ijin untuk berlaku PNBP, belum turun suratnya untuk itu. Jadi menggunakan swakelola saja. Kalo swakelola itu kan tergantung kesepakatan pemilik anggaran dengan kita sebagai rekanan, jadi kita hanya pelaksana saja. Contoh kita punya permintaan makan sehari sekian tapi kemampuan kita sekian. Kalo sudah menerima pnpb itu sudah beda lagi pasti sudah ada tarifnya untuk makan. Kita kan belum berlaku seperti itu jadi masih menggunakan swakelola tipe 2. kalo pnpb itu ada tarif untuk lingkungan pendidikan sekian, lingkungan pekerjaan sekian, lingkungan pendidikan sekian. Sedangkan Swakelola, jadi mereka mampu sekian dan jika kita bisa laksanakan dengan budget sekian kita laksanakan. Pendidikan Bela Negara itu kan sifatnya masih, jadi banyak orang yang ingin melaksanakan tapi anggarannya terbatas. Kemarin pernah ada SMP

Katolik sejakarta. Karena keterbatasan dana. Seragam menggunakan seragam mereka. Kita tetap mencantumkan standarnya untuk bajunya agar khas bela negara tetap ada. Misal item standar ada 10 mereka tapi mereka hanya mampu 6, yang 4 bisa mereka modifikasi selama sesuai dengan protap kementerian pertahanan.

Sedangkan pada kegiatan Non-Program itu sendiri selalu diadakan diluar Kalendar Program, sehingga untuk pembuatan jadwalnya harus menyesuaikan dengan prioritas program yang sudah direncanakan. Dari diskusi dengan Kabid Rendiklat, terdapat beberapa informasi terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut.

Kita kalo melaksanakan PKS itu berdasarkan untuk yang diluar program, kalo yang program itu kerjasamanya langsung dengan sekjen kemhan di pusat. Kita buat rancangan program 1 tahun yang namanya kalender diklat selama 1 tahun anggaran. Contohnya tahun ini ada 16 diklat, tapi yg disetujui hanya 7 diklat karena ada corona. Nanti didalam perjalanan diantara 1 tahun itu ada diklat lain dari BUMN, baru dibuat PKS. Itupun kewenangan PKS ada di badiklat, kita istilahnya hanya menjual dan mempromosikan. Misalnya saya bicara diluar, apakah ada yang berkenan dari perbankan, baru kita laporkan ke badiklat baru diproses oleh Badiklat mulai dari anggarannya

Setelah pihak instansi lain mendiskusikan daftar kegiatan dan kebutuhan dengan pihak Pusdiklat, maka selanjutnya proses pembuatan PKS dan MOU diserahkan kepada Badiklat kemhan. Baru jika sudah disetujui, akan dikembalikan ke Pusdiklat untuk dilaksanakan sesuai dengan isi kesepakatan tersebut.

Setelah dapat persetujuan Badiklat Kemhan, maka kegiatan Non-Program tersebut dapat dijalankan sesuai dengan kebutuhan pemegang anggaran, itu terkait jadwalnya, kebutuhan seragamnya, apakah dari kita atau mau menggunakan seragam sendiri. Itupun tentunya tetap harus memenuhi standar kegiatan kita nantinya, dan kebutuhan lain yang bisa didiskusikan dengan mereka terkait anggarannya.

Dalam interview yang berbeda dengan Kasubbid Minopsdiklat Bid Opsdiklat Pusdiklat Belneg, Ibu Hetty Purnamasari, S. Sos., M.M.. Dijelaskan juga mengenai kegiatan program dan non program lebih mendetail secara pengaturan operasional pendidikan dan pelatihan.

Jika ada program, biasanya kita yang menunjuk (Widyaiswara), tapi kalo non program seperti dari luar. Mereka kadang mau dosennya itu dari lembaga atau Professor A, B, C. Itu bisa diajukan. Contohnya dari Lemhannas, itu tergantung budget nya berapa. Untuk pengajar BNPT atau dari BNN itu sudah masuk ke program. Non Program contohnya dari eselon yang mau pengajarnya ini atau itu, bisa kita usahakan. yang menentukan materi adalah Rendiklat, sedangkan opsdiklat mengajukan pengajar dan narasumber, nanti koordinasi dengan koord WI nya, nanti Bapak Koord WI nya yang akan mengarahkan dan mengkoordinasikan dengan para Widyaiswara.

Pembuatan MOU atau PKS dengan instansi lain ini merupakan penyumbang terbesar bagi jumlah kader bela negara pada sektor lingkungan pekerjaan dan pendidikan. Prioritas pelaksanaan Diklat berdasarkan MOU atau PKS yang sudah dilaksanakan oleh Pusdiklat adalah salah satunya lembaga Keuangan seperti Bank Indonesia, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan keterangan ini, peneliti berusaha mendapatkan informasi dari seseorang yang bekerja di sebuah Lembaga Pembiayaan yang berada dibawah naungan OJK, sama halnya seperti lembaga Keuangan Bank atau Keuangan Non Bank lainnya. Menurut Ibu Tri Wahyuni, Compliance Manager yang berwenang terhadap kesesuaian aturan-aturan OJK dan aturan pemerintah lain yang harus dijalankan oleh perusahaan tempat dia bekerja.

Bahwa Untuk Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank seperti Perusahaan Pembiayaan harus menyediakan dana pendidikan sebesar 2,5% dari anggaran personnel expense perusahaan di tahun tersebut. Kemudian penggunaan dana ini

harus dilaporkan setiap tahun kepada OJK, kemana saja realisasinya dan berapa anggaran yang sudah dikeluarkan.

Tambahnya, semenjak pandemi Corona melanda Indonesia, OJK mengeluarkan kebijakan Peraturan Nomor 58/POJK.05/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Keuangan Non Bank. Yang memberikan keringanan terhadap Lembaga Keuangan Non Bank terhadap penggunaan anggaran dana pendidikan.

Selama masa pandemi, sebelum diputuskan oleh pemerintah bahwa pandemi belum berakhir, realisasi dana pendidikan boleh kurang dari 2.5%. Itu ada di Kebijakan OJK No 58/POJK tahun 2020. Namanya Kebijakan Countercyclical. Kalo untuk Bank itu aturannya sebenarnya dana anggarannya 5%, berbeda dengan perusahaan mutifinance, tapi kalo ga salah sekarang mereka ada kebijakan relaksasinya juga POJK No 11 tahun 2020, POJK stimulus Covid-19.

Peraturan ini dikeluarkan demi menjaga likuiditas lembaga keuangan Bank dan Non Bank. Namun dengan tetap menjaga kualitas pelayanan yang diberikan oleh kedua macam lembaga keuangan tersebut. Kedua peraturan inilah yang membuat Lembaga perbankan atau keuangan cukup aktif dalam melakukan peningkatan kompetensi, salah satunya di Pusdiklat Bela Negara. Mereka diharuskan untuk melaporkan setiap kegiatan peningkatan kompetensi SDM yang mereka lakukan kepada OJK. Jika mereka tidak melaksanakan kewajiban untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusianya, maka OJK akan memberikan sanksi administratif yang dimulai dari pemberian surat teguran.

Kembali diinformasikan oleh Ibu Yuni bahwa saat ini lembaga yang berada di bawah aturan OJK tidak hanya lembaga keuangan Bank, Lembaga Keuangan Non Bank dan Lembaga Keuangan Bank Syariah, tetapi

Perusahaan asuransi saat ini sudah berada dibawah pengaturan OJK. Artinya mereka juga diharuskan untuk menggunakan 2.5% dari anggaran penggajian karyawannya untuk dana pendidikan dan melaporkannya ke OJK setiap tahun seperti lembaga-lambaga lainnya di bawah OJK.

Untuk menjalankan kerja sama dengan pemerintah dalam hal pendidikan dan pelatihan di Pusdiklat Bela Negara, Perusahaan tidak hanya bisa masuk melalui perbankan dengan pemanfaatan dana pendidikannya. Tetapi juga dapat dilakukan melalui kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan yang biasa disebut Corporate Social Responsibility (CSR). Dalam wawancara dengan Ibu Yuni, disebutkan bahwa mulai tahun 2017, dikeluarkan kebijakan baru dari OJK, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.

POJK 51 sebenarnya rilis tahun 2017 tapi implementasinya rilis di tahun 2020. Peraturan tersebut memuat syarat keuangan berkelanjutan yang didalamnya ada tanggungjawab sosial. Setiap tahun, di setiap business plan itu kita harus melampirkan syarat keuangan berkelanjutan itu ke OJK. Anggaran CSR juga sudah ditetapkan di dalam anggaran biaya tersebut. Berapa biayanya, kerjasama dengan siapa.

Kegiatan Tanggungjawab sosial atau disebut Corporate Social Responsibility (CSR) pada sektor swasta. Dapat juga dijadikan alat pendekatan bagi Pusdiklat Bela Negara dalam mempromosikan kegiatan pendidikan dan pelatihannya. Tidak hanya di sektor lembaga Keuangan. Sektor perusahaan lainnya banyak yang melakukan kegiatan CSR, disamping hal ini dapat memberikan image positif perusahaan dimata publik, kegiatan ini pun dapat berpengaruh terhadap pajak perusahaan.

Kegiatan CSR itu itung-tungannya dan auditnya harus bener, jadi kalo sumbang ke NGO juga harus jelas. Salah satu cara CSR itu kerjasama dengan pemerintah, kan biasanya perusahaan itu salah

satu stakeholder di pemerintah. Contohnya Riau andalan Pulp and Paper mitranya ke Kementerian Perhutanan, Herbalife mitranya ke Kementerian Kesehatan. Kalo perusahaan Clemont kita kegiatan CSR langsung kerjasama dengan Head Office Korindo. Mereka ada bagian CSR yang akan bantu dan memutuskan bagaimana kita melakukan kerjasama untuk CSR. Perusahaan boleh ko kerjasama dengan lebih dari satu kementerian. Kaya Danone, dia masuk ke Kementerian Perindustrian dan Kementerian Lingkungan Hidup juga. Semakin banyak partnership semakin bagus. Berarti perusahaannya mendukung campaign/inisiatif pemerintah.

Kegiatan CSR sendiri memiliki peraturan pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseoran Terbatas dimana didalamnya salah satunya memuat mengenai kegiatan CSR pada pasal 74 ayat (1), yaitu:

*“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.”*

Bila ketentuan ini tidak dijalankan, maka ada sanksi yang akan dijatuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan CSR dilakukan untuk masyarakat. Bukan kepada karyawan sendiri. Diharapkan kegiatan ini tidak hanya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, tetapi juga bisa untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara umum. Bila perusahaan tidak menjalankan ketentuan CSR ini, maka pemerintah dapat memberikan sanksi yang sesuai dengan perundang-undangan. Untuk lebih detail, peraturan mengenai pelaksanaan CSR diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Pentingnya Peran Pusdiklat Bela Negara sebagai Pembentuk Sumber Daya Manusia Dalam Pertahanan Negara**

Sumber Daya Manusia sebagai bagian dari kekuatan Pertahanan Negara, terkandung dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Nasional (UU PSDN) Pasal 3. Dalam pasal tersebut tercantum bahwa salah satu tujuan UU PSDN tersebut adalah untuk mentransformasikan Sumber Daya Manusia sebagai Sumber Daya Nasional kekuatan Pertahanan Negara yang siap digunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara melalui pembangunan karakter Bela Negara. Untuk membangun Karakter Bela Negara tersebut sebuah program pendidikan dan pelatihan yang tepat harus dimulai sejak usia dini. Mereka harus mengenal negaranya yang sangat beraneka ragam baik dari segi agama, ras ataupun suku sebagai identitas nasional. Juga mengenali apa saja kekayaan-kekayaan negara ini yang membuatnya menjadi primadona negara-negara besar untuk dikuasai. Dengan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pendidikan karakter bela negara, maka dalam kondisi apapun, warga negara Indonesia akan selalu siap dalam menghadapi ancaman militer ataupun nirmiliter. Peresmian 19 Desember yang ditetapkan sebagai hari Bela Negara, menunjukkan betapa pentingnya Karakter Bela Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penetapan hari Bela Negara ini didukung oleh Keputusan Presiden mengenai Bela negara Nomor 28 Tahun 2006. Kemudian ditunjuk sebagai penanggungjawab hari Bela Negara tersebut adalah Kementerian Pertahanan. Penetapan dilakukan berdasarkan Surat Menteri Sekretaris Negara No. B/1730/M.Sesneg/D.I/DK.00.01/12/2011.

Penunjukkan Kementerian Pertahanan sebagai penanggungjawab Bela Negara didasarkan atas salah satu fungsinya yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 35 Tahun 2011. Peraturan tersebut berisikan

pedoman yang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kesadaran Bela Negara guna mendukung sistem pertahanan negara. Sebuah fungsi yang dijalankan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan yang berada di bawah Kemenhan, lalu sebagai dilaksanakan oleh Pusdiklat Bela Negara sebagai unsur pelaksana.

Pentingnya pendidikan dan pelatihan Bela Negara bagi pembangunan karakter bangsa, secara pribadi adalah menumbuhkan sikap disiplin, kepemimpinan, kerjasama, solidaritas, ketangguhan fisik, ketaqwaan terhadap agama, orang tua serta bangsa negara. Sedangkan secara bermasyarakat, Bela Negara menciptakan lingkungan yang rukun, aman, damai dan harmonis. Sedangkan secara Nasional kenegaraan, Bela Negara akan menciptakan kesejahteraan dan keadilan dalam ekonomi serta keamanan dalam hukum sehingga menimbulkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal tersebut menjadikan pendidikan dan bela negara penting untuk diberikan terutama kepada para generasi muda sebagai bibit-bibit penerus bangsa yang di masa depan akan bertanggungjawab terhadap dirinya, lingkungannya serta bangsa dan negaranya.

Banyak pemuda dan pemudi belum memahami makna dari negara. Bela Negara bukan hanya sebatas wajib militer, Bela Negara bukan hanya sebatas mengangkat senjata, Bela Negara bukan juga berarti membela pemerintah. Makna Bela Negara adalah setiap sikap dan tindakan kita yang mewujudkan rasa cinta kita terhadap negara, dalam menjaga kelangsungan hidup bangsa dan dilakukan secara konsisten, persis seperti yang digambarkan oleh Prof. Dr. Ir. Purnomo Yusgiantoro. Jadi bukan hanya sebatas wajib militer atau mengangkat senjata, lakukan dari hal yang kecil. Mulai dari taat hukum berkendara, peduli sesama atau bahkan tertib dalam kehidupan sehari-hari dan dalam bekerja. Bela Negara bukan berarti membela pemerintah, tetapi membela negara. Tujuannya adalah menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Saat masyarakat memberikan kritik

kepada pemerintah terhadap salah satu keputusannya yang mungkin salah atau mengancam keamanan, maka kritik tersebut dapat dikatakan sebagai usaha membela negara. Tentu saja dengan catatan bahwa kritik tersebut harus dilaksanakan dengan tatanan serta aturan yang berlaku. Jika tidak, maka justru kita menjadi salah satu faktor yang mengancam keamanan.

Namun, mengapa prioritas utama harus kepada generasi muda? Seperti yang sudah dipaparkan pada hasil penelitian dan beberapa hasil wawancara bahwa pendidikan dan pelatihan Bela Negara merupakan sebuah investasi pertahanan negara jangka panjang yang dapat kita dapatkan hasilnya di beberapa tahun mendatang. Untuk itu, generasi muda selalu pemilik masa depan bangsa dan negara ini harus memiliki contoh, inspirasi dan role model yang tidak membuat mereka melenceng dari ideologi atau budaya Indonesia. Banyak generasi muda yang sedang dalam tahap untuk pencarian jati diri, mudah untuk dipengaruhi oleh paham-paham diluar Pancasila. Seperti yang diutarakan oleh Kabid Evkat Mutu Diklat, Pusdiklat Bela Negara.

Peserta yang banyak itu perguruan tinggi karena di sana kan generasi muda yang wawasannya lebih luas, masih labil. Untuk sekitar jabodetabek kita coba beberapa ormas-ormas yang kira-kira bisa kita latih sebagai kader bela negara. Pesertanya kita minta ke Pemda seperti contohnya dari KNPI, itu kan organisasi para pemuda. Jadi Pemda yg nunjuk, bukan kita yg minta, hanya perwakilan-perwakilan daerah karena tidak bisa semuanya.

Dikutip dari media online Tribunews pada tanggal 31 Oktober 2017. Pada sebuah Survei yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga bernama Alvira Research Center, bersama dengan Mata Air Foundation. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa dan 23,3 persen pelajar SMA "Mereka setuju dengan jihad untuk tegaknya negara Islam atau Khilafah". Hal ini dikemukakan oleh salah satu peneliti yang juga seorang tokoh NU, Musron

Wahid. Pendidikan wawasan kebangsaan harus dilakukan sejak dini, atau kelompok-kelompok lain yang bertentangan dengan Pancasila akan mengambil alih. Mereka menjadi inspirasi dan contoh yang sangat dekat bagi mereka, dimana seharusnya negara bisa hadir didalamnya demi menjaga keutuhan bangsa ini.

Tentu saja bahwa setiap warga negara Indonesia adalah bagian dari Sumber Daya Manusia yang tercantum dalam UU PSDN, bukan hanya para generasi mudanya. Untuk itu, pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan pun harus dipertimbangkan sesuai dengan lingkungan masyarakat mana yang mereka didik dan latih. Pengembangan Bela Negara erat kaitannya dengan pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia. Dalam pengembangan karakter tersebut, Pendidikan dan Pelatihan menjadi sebuah kunci penting yang dapat membantu sebuah organisasi untuk menghadapi berbagai tantangan dan ancaman terhadap organisasinya. Tanpa kompetensi dan kemampuan yang tepat, maka tidak ada organisasi yang dapat bertahan terhadap derasnya perubahan globalisasi. Sebagai sebuah organisasi raksasa, negara memiliki Sumber Daya Manusia yang sangat besar untuk dikelola. Perubahan-perubahan eksternal seperti Globalisasi, Teknologi, persaingan antar negara dan lain sebagainya, dapat memberikan ancaman terhadap sebuah negara. Pada akhirnya perubahan-perubahan eksternal tersebut akan memicu perubahan internal sebuah negara dan memberi bentuk potensi ancaman yang berbeda. Untuk selalu dapat menang melawan ancaman-ancaman tersebut, menjaga pertahanan negara yang mengarah pada keamanan nasional, maka Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sebuah investasi krusial bagi sebuah organisasi. Karena SDM tersebut lah yang nantinya akan mengemudikan dan menjalankan organisasi besar yang disebut negara.

Melalui pendirian Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara, Pemerintah Indonesia membuktikan bahwa salah satu tujuan pendidikan dan

pelatihan di bidang pertahanan adalah untuk membentuk warga negara yang berkarakter bela negara, memiliki jiwa nasionalis dan memiliki kemampuan dasar bela negara. Disinilah peran pembangunan Pusdiklat Bela Negara, Kementerian Pertahanan bahkan sudah mempersiapkan dasar dasar hukum pengoperasian Pusdiklat Bela Negara yang termuat pada Bagian Ketujuh Peraturan menteri pertahanan republik indonesia nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Februari 2017 yang tugas dan fungsinya juga tertera di Permenhan Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan pada tanggal 21 Maret 2019. Namun sebuah evaluasi dibutuhkan untuk melihat apakah Pusdiklat Bela Negara sudah menjalankan fungsi strategisnya sebagai bagian Pertahanan Negara atau tidak. Hal inilah yang belum dimaksimalkan oleh Pemerintah dalam mengembangkan potensi keberadaan Pusdiklat Bela Negara.

Jika dilihat dari 3 aspek landasan keamanan dari Barry Buzan sebagai seorang ahli keamanan. Pembangunan karakter Bela Negara jika dievaluasi, diharapkan untuk memenuhi 3 aspek landasan keamanan tersebut.

1. Landasan Ideasional

Secara ideasional yang menurut Buzan adalah wawasan Kebangsaan. Pembangunan karakter Bela Negara didalamnya sudah meliputi wawasan kebangsaan, yaitu 4 (empat) konsesus dasar negara (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika). Hal terpenting dari wawasan kebangsaan adalah dimana seseorang mengenal negaranya. Hal inilah yang dibangun oleh Pusdiklat Bela Negara, Wawasan Kebangsaan yang mengarah pada Cinta Tanah Air.

2. Landasan Institusional

Secara kenegaraan, setiap warga negara diwajibkan untuk tunduk terhadap norma-norma hukum negaranya, termasuk norma-norma

pendukung didalamnya seperti norma agama. Untuk ini dibutuhkan sikap Disiplin. Sikap Disiplin sendiri adalah salah satu hal pokok yang dididik oleh Pusdiklat sepanjang siang dan malam proses Diklat berlangsung.

### 3. Landasan Fisik

Pusdiklat Bela Negara memberikan pelatihan yang akan melengkapi kemampuan dasar Bela Negara dimana setiap warga diharapkan untuk mampu secara fisik membela negaranya, mulai dari kebugaran, bela diri dan latihan fisik lainnya. Dengan memiliki Wawasan Kebangsaan, Disiplin, serta kemampuan fisik, diharapkan setiap warga negara mampu untuk menjaga bangsa, wilayah dan semua Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh negara dari ancaman eksternal ataupun internal.

Sebagai pelengkap, pembangunan lembaga Pendidikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara merupakan bagian dari realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang didalamnya menetapkan Pendidikan Bela Negara sebagai salah satu strategi dalam membentuk sistem keamanan yang terintegrasi (RPJMN 2015-2019, Buku II Bab 6 Sasaran Bidang Pertahanan dan Keamanan). Dengan fungsinya sebagai bagian dari keamanan nasional, maka lembaga tersebut berdiri dibawah Kementerian Pertahanan. Pendidikan dan pelatihan Bela Negara tersebut diberikan kepada seluruh komponen Bangsa. Negara sebagai sebuah organisasi, melalui Pusdiklat Bela Negara melakukan investasi SDM jangka panjang. Maka penting bagi Pusdiklat untuk menjaga eksistensinya melalui Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan yang berkelanjutan. Sebagai upaya menunjukkan kepada negara bahwa investasi tersebut sepadan dengan usaha Pertahanan Negara yang diwujudkan.

Evaluasi terhadap materi pendidikan dan pelatihan bagi Pusdiklat Bela Negara harus dinilai secara berkelanjutan. Materi-materi yang diberikan sangat

diharapkan untuk dapat menerapkan Wawasan kebangsaan, wawasan kejuangan dan wawasan budaya Tri Wawasan (*tri wawasan*). Tri wawasan yang digunakan oleh Visi Misi yang digunakan Lembaga Perguruan Taman Taruna Nusantara (LPTTN) yang diterapkan dalam pengarahannya pendidikannya. Tri Wawasan ini dapat digunakan oleh Pusdiklat Bela Negara sebagai salah satu acuan untuk menyempurnakan sistem atau program diklatnya. Penerapan tri wawasan ini dipandang bagi bermanfaat bagi Pusdiklat Bela Negara dikarenakan;

1. Wawasan Kebangsaan

Wawasan Kebangsaan adalah sikap bangsa untuk bergerak bulat dalam rasa kebangsaan guna berbakti bagi kepentingan bangsa dan negara (Ketentuan-Ketentuan Pokok Tentang Perguruan Taman Taruna Nusantara Pasal 8).

2. Wawasan Kejuangan

Wawasan Kejuangan adalah sikap warga negara yang pantang menyerah dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan tanah air serta setia kepada perjuangan bangsa (Ketentuan-Ketentuan Pokok Tentang Perguruan Taman Taruna Nusantara Pasal 9).

3. Wawasan Budaya

Wawasan Kebudayaan adalah cara pandang bangsa dalam menghayati ketinggian kebudayaan nasional dengan tidak menolak unsur kebudayaan asing yang dapat memperkaya kebudayaan nasional dan mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia dan menuju 5 kemajuan adab, budaya dan persatuan (Ketentuan-Ketentuan Pokok Tentang Perguruan Taman Taruna Nusantara Pasal 10).

Dari hasil penelitian yang sudah didapatkan oleh peneliti, Pusdiklat didalam giat belajarnya sudah menerapkan wawasan kebangsaan dalam materi diklat dengan metode ceramah kelas dan tanya jawab. Ditambahkan oleh Dr. Teguh Anggoro, S.I.P., M.Sc. dalam wawancara yang sudah dicatat pada hasil

penelitian bahwa wawasan kebangsaan tersebut di tegaskan kembali secara praktek mulai dari bangun tidur hingga peserta kembali tidur. Wawasan Kebangsaan yang dimaksud oleh Pusdiklat Bela Negara, disandarkan pada empat (4) konsensus dasar bangsa Indonesia (Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Bhineka Tunggal Ika dan nilai-nilai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sedangkan pada Wawasan Kejuangan, Pusdiklat Bela Negara juga sudah menyertakan pembelajaran tersebut di dalam mater-materi kelasnya yang termasuk sejarah Bela Negara dan Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Bangsa yang juga berbentuk ceramah kelas dan Tanya Jawab. Namun untuk Wawasan Budaya masih kurang ditempatkan didalam materi pembelajaran. Wawasan kebudayaan merupakan identitas bangsa Indonesia yang terkadang sarat bermuatan konflik jika tidak diakomodasi dengan baik dengan toleransi dan kesadaran adanya persatuan dalam keberagaman. Didalam materi pendidikan terdapat pendidikan mengenai mengenai nilai-nilai persatuang sebagai warga negara Indonesia, tetapi tidak menyentuh isu sensitifnya, yaitu kesadaran dalam berbudaya. Selain itu wawasan kebudayaan bukan berarti kita menolak budaya asing yang masuk ke Indonesia, tetapi mempertahankan diri dari dampak negatif dari budaya tersebut tanpa kehilangan identitas bangsa Indonesia. Banyak hal-hal bermanfaat yang dapat memperkaya pengetahuan kita dalam berbangsa dan bernegara dengan mempelajari berbagai budaya, terutama harus mengenal budaya nasional kita sendiri. Pada akhirnya, Fungsi dari Evaluasi Diklat dalam pembahasan ini adalah untuk menunjukkan fungsi kualitatif dari pentingnya peran Pusdiklat Bela Negara untuk dikembangkan secara organisasi dan kapasitas dengan dukungan pemerintah.

#### **4.3.2 Pengembangan Pusdiklat Bela Negara untuk mewujudkan Usaha Bela Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Nasional**

Potensi pertahanan negara yang dimiliki oleh Pusdiklat Bela Negara sangat besar, baik itu bagi generasi muda dimana paham-paham asing mudah melakukan infiltrasi ataupun bagi daerah-daerah di Indonesia yang rawan terhadap konflik. Terutama Pusdiklat Bela Negara dapat menjadi pagar pertama dalam menjaga Keamanan Nasional di daerah perbatasan dengan negara lain seperti di Kalimantan, Papua dan Aceh. Komitmen pemerintah sangat diperlukan terhadap pengembangan Pusdiklat agar dapat berperan lebih jauh didalam masyarakat sebagai garis pertahanan negara. Pelaksanaan Evaluasi terhadap institusi-institusi (Kementerian dan BUMN) serta terhadap daerah-daerah diperlukan sebagai data analisa pencapaian yang dilakukan oleh Pusdiklat. Perbaikan kurikulum serta peningkatan mutu tenaga pendidik dan pelatih sangat dibutuhkan hingga Pusdiklat Bela Negara mampu mencapai tahap kesiapan dalam melakukan pengembangan ke daerah-daerah. Bukan tidak mungkin jika peningkatan mutu tersebut akan membawa Pusdiklat untuk membuat kurikulum baru yang ditujukan khusus kepada kaum disabilitas. Seperti yang disebutkan bahwa saat ini, setelah menjalankan diklat selama 4 tahun, rasio jumlah alumni kader Bela Negara hingga November 2020 dengan jumlah penduduk Indonesia adalah 1,8 juta :1, jadi hanya terdapat 1 kader bela diantara 1,8 juta penduduk Indonesia. Hal tersebut pun masih ditambah faktor jumlah alumni kader bela negara yang tidak merata di dalam setiap wilayahnya. Ditambah lagi dengan para para kaer bela negara jika dkembalikan kedalam lingkungan dimana hanya dia satu-satunya kader bela negara didalamnya, maka bukan tidak mungkin jiwa Bela Negaranya akan naik turun. Maka dibutuhkan jumlah peserta diklat yang konsisten untuk berbagai lapisan masyarakat di berbagai daerah Indonesia untuk dapat mendukung seorang Kader Bela Negara dalam menjalankan kewajibannya, hal ini juga dapat memberikan keuntungan lain. Seperti saat melakukan evaluasi terhadap

para kader alumni Bela Negara di daerah, Badiklat Kemhan tidak perlu meluangkan waktu atau anggaran yang besa untuk melakukan evaluasi di daerah-daerah, bahkan evaluasi tersebut dapat dilakukan secara simultan dan serentak di setiap daerah. Selain itu dengan adanya pengembangan organisasi dan kapasitas pelatihan, maka para Kader Bela Negara dapat saling membantu dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, mereka juga memiliki tempat untuk melakukan konsultasi yang dekat dengan mereka di daerah perihal permasalahan yang mereka alami sebagai kader bela negara.

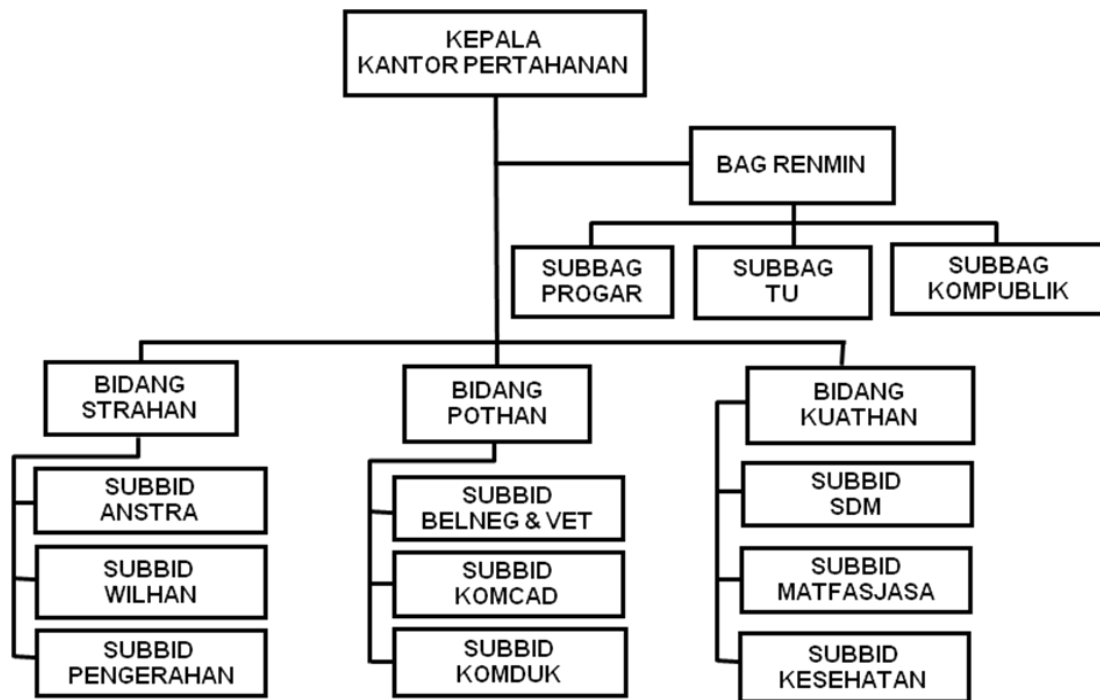
#### **4.3.2.1 Pengembangan wilayah operasional Pendidikan dan Pelatihan di daerah-daerah**

Guna meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat sebagai Kader Bela Negara, Pusdiklat perlu untuk bisa meraih daerah-daerah lain di luar Jabodetabek. Pusdiklat Bela Negara merupakan sub satuan kerja yang berada di bawah Badiklat Kemhan yang merupakan pelaksana dari Ditjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan. Untuk itu, jika Pusdiklat ingin bergerak di daerah, memerlukan sebuah badan atau perwakilan yang akan membantu dalam koordinasi di daerah tersebut. Perwakilan tersebut harus berada dibawah Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan yang merupakan perpanjangan tangan Kementerian Pertahanan yang menjalankan fungsinya dalam bidang Pertahanan di daerah. Untuk itu, Kantor Wilayah Kementerian Pertahanan dapat mendukung kegiatan Pusdiklat Bela Negara di daerah-daerah, seperti dalam melakukan koordinasi untuk pemanfaatan tempat pendidikan dan pelatihan yang dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, TNI (Rindam) dan/atau milik lembaga-lembaga diklat milik pemerintah/kementerian lain di daerah. Hal ini juga dapat dilakukan sebagai alternatif untuk memaksimalkan fasilitas negara yang sudah ada di daerah untuk usaha pertahanan. Tentu saja, bagi Pemda, usaha Pertahanan negara

merupakan salah satu fungsi Pemerintah Daerah dan kementerian Pertahanan hadir untuk membantu serta mendukung Pemda untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut.

**Tabel 4.8** Rencana awal Struktur Organisasi Kanwil Kemhan di daerah

(Sumber : Biro Ortala Kemhan)



Tentu saja fungsi Kanwil tersebut nantinya tidak hanya untuk mengakomodasi Pusdiklat Bela Negara dalam menanamkan nasionalisme dan patriotisme di daerah. Namun sebagai pelaksana fungsi-fungsi pertahanan negara di daerah, terutama di perbatasan. Dalam segi pertahanan, Kanwil Kemhan dapat melakukan pengelolaan terhadap potensi-potensi pertahanan di daerah seperti yang salah satunya dikelola oleh Badan Pembinaan Administrasi Veteran dan Cadangan (Babinminvetcad). Dalam salah satu dialog yang dilakukan oleh Kababinminvetcad Kodam XII/Tpr dengan Radio Republik Indonesia (Pontiana), menjelaskan bahwa salah satu fungsi dari

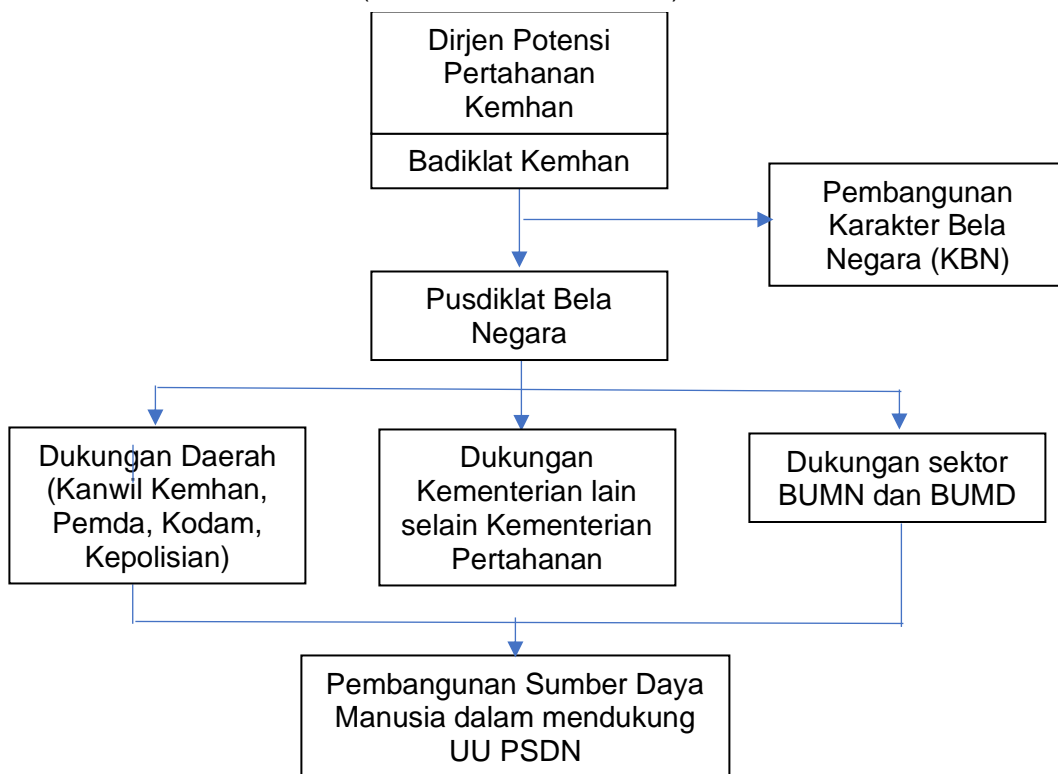
babinminvetcad adalah untuk membina administrasi bagi para Veteran Republik Indonesia, Komponen Pendukung dan Komponen Cadangan di daerah-daerah. Disinilah, UU PSDN dan Peraturan Turunannya dapat difungsikan secara maksimal oleh Kanwil Kemenhan, karena pada dasarnya bahwa Babnminvetcad merupakan fungsi dibawah Ditjen Pothan. Selain itu, tentu saja Kanwil juga dapat melakukan koordinasi dengan pihak-pihak di daerah yaitu, masyarakat, pemda, TNI (Rindam) dan Kepolisian terkait urusan Pertahanan Negara. Pertahanan bukanlah fungsi yang dapat diotonomikan kepada instansi lain di daerah. Tugas dan fungsi Pertahanan tertera di dalam amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Secara strategis, negara Indonesia dapat memberikan efek gentar di daerah perbatasan bahkan menjaga nasionalisme di daerah rawan konflik dimana Kanwil Kemhan paling dibutuhkan keberadaannya.

Dalam pelaksanaan Pusdiklat di daerah, untuk dapat menjalankan efisiensi dana, agar dapat dialokasi ke dalam kegiatan yang lebih penting dan signifikan. Selain menggunakan fasilitas diklat milik milik Diklat lain, Pemda atau Rindam. Pusdiklat juga dapat melakukan kerjasama untuk tenaga pelatih dan pendidik dengan berbagai pihak tersebut jika dibutuhkan. Namun kerjasama ini akan sulit terwujud tanpa adanya Kanwil Kemhan sebagai pendukung, karena pada posisi secara organisasi, Pusdiklat tidak memiliki posisi yang dapat secara langsung melakukan koordinasi ini. Secara organisasi Pusdiklat dilihat memiliki tingkat yang sama dengan mereka, sehingga pihak lain tidak memiliki kewajiban atau dapat memilik untuk tidak melakukan kerjasama. Jika terdapat kehadiran Kanwil di daerah, maka instruksi-instruksi tersebut akan dapat bersifat mengikat dengan tentu saja persetujuan pusat.

Potensi kerjasama dan potensi pertahanan yang bisa didapatkan dengan kehadiran Kanwil dan Pusdiklat di daerah sangat penting. Dengan ini, perwakilan dapat melakukan sosialisasi di daerah mengenai pentingnya

pembangunan karakter Bela Negara, mendekati diri dengan masyarakat untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat mengenai bentuk-bentuk bela negara, tri wawasan dan juga menghilangkan ketakutan mereka terkait wajib militer yang terkait dengan kegiatan militerisme.

**Tabel 4.9** Mekanisme Pembangunan Sumber Daya Nasional Melalui Pusdiklat Bela Negara  
(Diolah oleh Peneliti, 2020)



Secara manajemen strategis, sebuah organisasi harus memahami kondisi lingkungan internal dan eksternal mereka. Dalam pembangunan Pusdiklat maka dibutuhkan adalah;

#### 1. Formulasi

Melakukan koordinasi-koordinasi dengan berbagai pihak atau instansi di setiap daerah agar sistem kerja Pusdiklat nantinya dapat berjalan dengan lancar. Membuat formulasi dari kekuatan dan kelemahan Pusdiklat yang dapat dimanfaatkan di daerah, serta

melakukan identifikasi terhadap tantangan yang mungkin muncul di setiap daerah serta opsi apa saja yang dapat dilakukan berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Termasuk didalamnya adalah melakukan pemilihan WI serta pelatih yang tepat.

## 2. Implementasi

Bagi implementasi di daerah, maka sisten Pendidikan dan Pelatihan tersebut harus disesuaikan dengan keadaan Sumber Daya Manusia di daerah tersebut. Pembuatan kurikulum juga harus melibatkan atau setidaknya berkonsultasi dengan tokoh lokal. Melupakan tradisi lokal dan mengadaptasikannya terhadap kurikulum pendidikan, maka sistem pelatihan akan mengalami resistensi dari masyarakat lokal. Mengenali peserta Diklat kemudian menyesuaikannya.

## 3. Evaluasi

Melakukan penilaian akhir terhadap perubahan kader Bela Negara beserta lingkungannya. Melihat hasil investasi dari Pusdiklat Bela Negara sebagai garis pertahanan yang harus dilaksanakan sejak dini dan di setiap daerah kepada berbagai lapisan masyarakat.

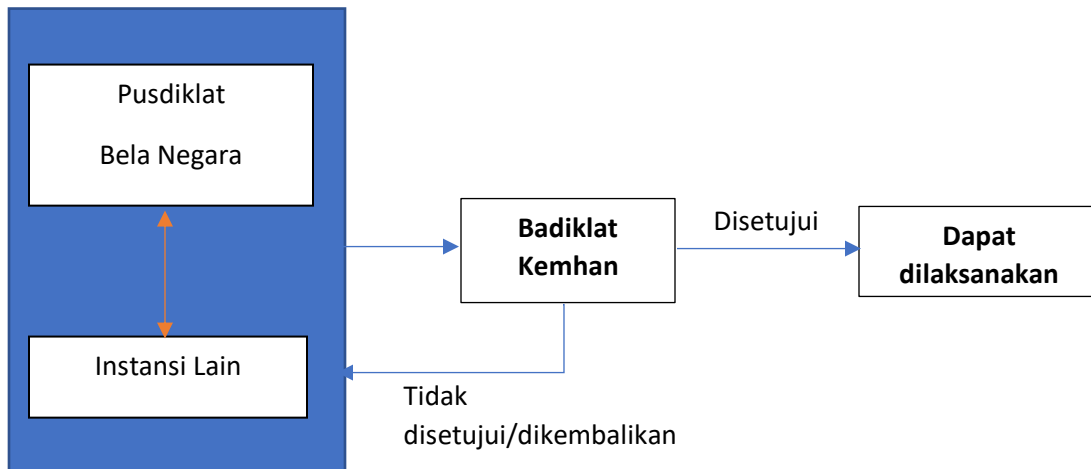
Tugas dan kewajiban pada tataran strategis untuk kepentingan nasional tidak dapat lagi dipikulkan kepada salah satu komponen pertahanan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat (1) setiap warga negara berhak dan wajib dalam usaha pertahanan negara. Maka, kesadaran setiap warga negara untuk ambil bagian dalam bela negara perlu digelorakan ketika negara membutuhkan. Penyusunan strategi untuk mengamankan kepentingan nasional tidak terlepas dari bagaimana pertahanan militer dan pertahanan nonmiliter dielaborasi untuk menjadi kekuatan yang dapat digunakan sesuai hakikat ancaman yang dihadapi. Pengintegrasian pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter merupakan bentuk kesemestaan dalam sistem pertahanan negara.

Pertahanan Negara yang bersifat semesta bagi bangsa Indonesia merupakan model yang dikembangkan sebagai pilihan. Dilihat dari jenis ancaman terhadap pertahanan negara dapat digolongkan dalam ancaman militer dan ancaman nonmiliter. Menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama diperkuat oleh masyarakat sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung. Menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan Kementerian/Lembaga di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, dibantu unsur lain kekuatan bangsa.

#### **4.3.2.2 Kerjasama dengan sektor Instansi Lain (Kementerian lain, BUMN dan BUMS)**

Dari laporan alumni peserta Kader Bela Negara yang dimiliki oleh Bidang Evkat Mutu Diklat, Pusdiklat Belneg, bahwa sebagian besar peserta pendidikan dan pelatihan di Pusdiklat Bela Negara adalah peserta yang datang melalui kegiatan Non-Program, dimana mereka harus membuat MOU atau Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak Pusdiklat Bela Negara atas persetujuan Badiklat Kemhan. Kerjasama pembiayaan dalam pendidikan dan pelatihan tersebut berangkat dari aturan Swakelola Tipe 2 (peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012). Dimana Pusdiklat dan Pemilik anggaran merupakan mitra dimana isi perjanjian dapat disesuaikan dengan penyerapan dana yang tersedia oleh pemilik anggaran. Penyesuaian anggaran yang dimaksudkan adalah elemen-elemen pendukung kegiatan diklat seperti makanan, baju olah raga dan beberapa hal lainnya yang tidak berdampak langsung dengan kegiatan diklat. Pemilik dana dapat memberikan request untuk mengganti menu sesuai anggaran mereka atau mereka dapat menggunakan pakaian olah raga mereka sendiri. Tentu saja dengan catatan bahwa apa yang mereka minta atau kenakan tetap harus sesuai dengan protap atau standar yang dimiliki oleh Kementerian Pertahanan.

**Tabel 4.10** Mekanisme Proses Perjanjian Kerjasama Swakelola Tipe-2 di Pusdiklat Bela Negara  
(Diolah oleh Peneliti, 2020)



Peserta-peserta non program tersebut, seperti yang sudah disebutkan dalam gambaran umum, datang dari sektor Pendidikan Swasta, Kementerian selain Kemenhan, BUMN dan Pemerintah Daerah (Pemda). Untuk itu kegiatan Non-Program ini memiliki potensi untuk diperluas, sekaligus dapat menopang kegiatan Pusdiklat Bela Negara di daerah-daerah. Untuk sektor Pendidikan Swasta, mereka banyak mengirimkan murid-muridnya untuk membangun karakter disiplin dan empati pada generasi muda. Sedangkan untuk pihak Kementerian selain Kemenhan, mereka mendidik dengan tujuan agar para Aparatur Sipil Negara tersebut memiliki integritas dalam melayani dan memberi contoh kepada masyarakat.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, secara signifikan telah mendorong kesadaran PNS untuk menjalankan profesinya sebagai ASN dengan berlandaskan pada: a) nilai dasar; b) kode etik dan kode perilaku; c) komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; d) kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; dan e) profesionalitas jabatan. Implementasi terhadap

prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian dan partisipasi untuk meningkatkan kapasitas organisasi dengan memberikan penguatan untuk menemu-kenali perubahan lingkungan strategis secara komprehensif pada diri setiap ASN.

Melalui pembangunan karakter Bela Negara, para ASN diberikan bekal untuk membangun integritas, empati, etika dan kejujuran yang kemudian diharapkan berdampak pada kinerja birokrasi secara umum serta terhadap pelaksanaan tugas jabatan ASN sebagai pelayan masyarakat. Salah satu prioritas penting dalam pendidikan Bela Negara ini adalah Kementerian Pendidikan, yaitu Guru. Pendidikan dan pelatihan Bela Negara tidak hanya diberikan kepada para murid, tetapi juga kepada para tenaga pendidiknya. Guru adalah sosok terdekat kepada murid-muridnya selain orang tua, merekalah yang bertanggungjawab terhadap pembentukan pemahaman atau pola pikir murid-murid tersebut.

Pemerintah juga bisa melakukan sosialisasi terhadap sektor perusahaan-perusahaan (BUMN dan BUMS) yang berada dibawah yurisdiksi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Setiap perusahaan selalu memiliki anggaran khusus yang dialokasikan untuk pengembangan karyawan. Pengembangan ini dapat berupa keterampilan dan keahlian. Terutama pada perusahaan Keuangan yang berada dibawah peraturan OJK. Mereka yang diharuskan untuk menyisihkan setidaknya 2,5% dari anggaran pengeluaran Sumber Daya Manusia mereka setiap tahunnya dapat menjadi potensi pengembangan Pusdiklat Belneg. Banyak sekali perusahaan menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah untuk mendidik jiwa kepemimpinan dan kerjasama di dalam perusahaan. Perusahaan saat ini memiliki kesulitan bukan dalam mencari personil yang memiliki keahlian, tetapi personil dengan integritas. Disinilah Pusdiklat hadir. Perusahaan memiliki kesulitan untuk mendapatkan kompetensi-kompetensi tersebut. Pusdiklat dapat memberikan dua keuntungan. Pendidikan karakter Bela Negara sebagai garis pertahanan

negara dalam Sumber Daya Manusia bagi Pemerintah, serta peningkatan kompetensi karakter para personil yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

Peningkatan kompetensi personil perusahaan tentu saja lebih masuk ke dalam ranah lingkungan Pekerjaan. Lalu bagaimana dengan Lingkungan Pemukiman? Pusdiklat Bela Negara dapat melakukan sosialisasi kepada sektor perusahaan-perusahaan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 mengenai Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Dalam peraturan ini, pihak perusahaan dapat melakukan kegiatan tanggungjawab sosial dengan cara bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan melalui Pusdiklat Bela Negara dengan maksud mendukung inisiatif/campaign pemerintah. Peraturan ini memungkinkan perusahaan untuk mendukung pembangunan karakter Bela Negara di lingkungan pemukiman seperti para tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda-pemuda dalam organisasi masyarakat, pengusaha-pengusaha UKM muda atau bahkan sebuah program pembangunan karakter khusus untuk kaum disabilitas. Dalam hal ini pun Pusdiklat dapat membantu para perusahaan untuk menjalankan kewajibannya terhadap Peraturan Pemerintah tersebut sekaligus membangun karakter Bela Negara dalam lingkungan pemukiman yang disponsori oleh program CSR perusahaan-perusahaan.

Pengembangan melalui organisasi dan partisipasi sektor lain sebagai mitra diharapkan menambah kuantitas masyarakat Indonesia yang dapat bertransformasi menjadi kader bela negara berkala. Hal ini sejalan dengan Peraturan turunan UU PSDN yang baru saja diresmikan pada tanggal 12 Januari 2021, yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20129 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Undang-Undang tersebut

mengatur salah satunya adalah tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) dan Pembinaan dan kerjasama dalam pelaksanaan pengabdian sesuai profesi. Melalui kedua hal tersebut, Pusdiklat dapat bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama atau kementerian lain serta institusi lain selain kementerian untuk melakukan sosialisasi mengenai Pengembangan Karakter Bela Negara dalam lingkup pendidikan dan dalam lingkup pekerjaan. Peraturan Pemerintah tersebut juga dapat dijadikan dasar yang mendukung Pusdiklat untuk melaksanakan kerjasama dengan berbagai sektor lain baik itu kementerian, pemerintah daerah ataupun sektor swasta dalam pengembangan karakter Bela Negara.